



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Jl. Pulau Mendanau No. 2 Kelurahan Air Itam Pangkalpinang, 33418

Telp : 0717 9114210

Laman : www.babel.bawaslu.go.id

**SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG**

**Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
31 DESEMBER 2021**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pangkalpinang, 17 Januari 2022

Kepala Sekretariat



ROY M SIAGIAN

NIP. 19720312 199303 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Pernyataan Tanggung Jawab	4
Ringkasan Laporan Keuangan	5
I. Laporan Realisasi Anggaran	7
II. Neraca	8
III. Laporan Operasional	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	11
V. Catatan atas Laporan Keuangan	12
A. Penjelasan Umum	12
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	24
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	48
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	66
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	82
F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	88
VI. Lampiran	97

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**
*JALAN MENDANAU NO. 2 KELURAHAN AIR ITAM KEC. BUKIT INTAN
TELEPON (0717) 9114210*

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalpinang, 17 Januari 2022

Kepala Sekretariat,



ROY M SIAGIAN

NIP. 19720312 199303 1 002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Realisasi Pendapatan Negara adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2021 sebesar Rp70.745.194,00 Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp19.900.944.400,00 atau mencapai 93 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp21.334.352.000,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.386.499.199,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp0,00 Aset Tetap (neto) sebesar Rp2.371.568.762,00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp14.930.437,00. Nilai Kewajiban sebesar Rp16.896.053,00 dan Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.369.603.146,00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp21.500.297.296,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp21.500.297.296,00. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp891.393.685,00 dan sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp22.391.690.981,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 sebesar Rp9.351.434.041,00 dikurangi dengan defisit LO senilai Rp22.391.690.981,00 dikurangi dengan koreksi lain-lain senilai Rp2.998.411.825,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp18.408.271.911,00 dikurangi dengan penurunan ekuitas senilai Rp6.981.830.895,00 sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp2.369.603.146,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
 DAN 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	Per 31 Desember 2021		%	Per 31 Desember
		ANGGARAN	REALISASI		thd Angg
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		0	70.745.194,00	0%	50.691.368,00
JUMLAH PENDAPATAN		0	70.745.194,00	0%	50.691.368,00
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	6.481.498.000,00	5.963.165.541,00	92%	5.233.674.822,00
Belanja Barang	B.4	14.847.354.000,00	13.932.328.859,00	94%	35.597.189.837,00
Belanja Modal	B.5	5.500.000,00	5.450.000,00	99%	627.691.000,00
JUMLAH BELANJA		21.334.352.000,00	19.900.944.400,00	93%	41.458.555.659,00

II. NERACA

**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1	0,00	4.421.215.885,00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.2	0,00	180.356.000,00
Persediaan	C.3	0,00	0,00
Jumlah Aset Lancar		0,00	4.601.571.885,00
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.4	9.515.880.360,00	10.136.683.860,00
Gedung dan Bangunan	C.5	94.308.000,00	94.308.000,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.6	8.000.000,00	8.000.000,00
Aset Tetap Lainnya	C.7	59.950.000,00	1.021.212.114,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.8	(7.306.569.598,00)	(6.499.682.768,00)
Jumlah Aset Tetap		2.371.568.762,00	4.760.521.206,00
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.9	27.000.000,00	27.000.000,00
Aset Lain-lain	C.10	626.253.500,00	0,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.11	(638.323.063,00)	(24.375.000,00)
Jumlah Aset Lainnya		14.930.437,00	2.625.000,00
JUMLAH ASET		2.386.499.199,00	9.364.718.091,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.12	16.896.053,00	13.284.050,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		16.896.053,00	13.284.050,00
JUMLAH KEWAJIBAN		16.896.053,00	13.284.050,00
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas	C.13	2.369.603.146,00	9.351.434.041,00
JUMLAH EKUITAS		2.369.603.146,00	9.351.434.041,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.386.499.199,00	9.364.718.091,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
DAN 31 DESEMBER 2020**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	31 Desember 2021	31 Desember 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN	D.1		
Pendapatan Negara Bukan Pajak		0,00	47.505.911,00
JUMLAH PENDAPATAN		0,00	47.505.911,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	5.966.322.637,00	5.233.674.822,00
Beban Persediaan	D.3	60.549.000,00	381.370.882,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	9.776.322.366,00	25.700.047.719,00
Beban Pemeliharaan	D.5	595.275.194,00	934.770.074,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	3.680.993.206,00	9.926.050.754,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	1.420.834.893,00	1.644.144.061,00
JUMLAH BEBAN		21.500.297.296,00	43.820.058.312,00
SURPLU (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(21.500.297.296,00)	(43.772.552.401,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8		
SURPLUS (DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	2.159.999,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		961.262.114,00	0,00
Jumlah Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(961.262.114,00)	2.159.999,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		69.868.429,00	62.906.300,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	78.541.208,00
JUMLAH SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		69.868.429,00	(15.634.908,00)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(891.393.685,00)	(13.474.909,00)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(22.391.690.981,00)	(43.786.027.310,00)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

URAIAN	Ref	31 Desember 2021	31 Desember 2020
POS LUAR BIASA	D.9	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT LO	D.10	(22.391.690.981,00)	(43.786.027.310,00)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
EKUITAS AWAL	E.1	9.351.434.041,00	7.352.351.790,00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(22.391.690.981,00)	(43.786.027.310,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI		0,00	0,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(2.998.411.825,00)	0,00
LAIN-LAIN		(2.998.411.825,00)	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	18.408.271.911,00	45.785.109.561,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(6.981.830.895,00)	1.999.082.251,00
EKUITAS AKHIR	E.6	2.369.603.146,00	9.351.434.041,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum dan Profil Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

*Dasar Hukum
dan Profil
Entitas*

1) Dasar Hukum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

1. Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah:
 - a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:
 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pencalonan gubernur;
 3. proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan calon gubernur;
 4. penetapan calon gubernur;
 5. pelaksanaan kampanye;
 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 9. proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan

11. proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pemilihan gubernur;
 - b. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI;
 - c. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi;
 - g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
 - h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.
1. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dapat:
 - a. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan

- b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

2. Profil Sekretariat Bawaslu Provinsi

Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi dikepalai oleh Kepala Sekretariat yang bertanggungjawab kepada Bawaslu Provinsi.

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi membawahi 3 (tiga) Kepala Bagian, yaitu :

- a) Kepala Bagian Administrasi;
- b) Kepala Bagian Pengawasan dan Humas;
- c) Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis

A.3. Basis Akuntansi

Akuntansi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak	50%

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

	dilakukan pelunasan	
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode

garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software/Aplikasi Komputer</i>	4
Lisensi	10

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga,

Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan Tahun Anggaran 2021, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 8 kali revisi dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh Penyesuaian untuk pelaksanaan kegiatan, adanya *Refocusing* anggaran akibat pandemi Covid-19 dan Pengesahan Hibah Dalam Negeri ke dalam DIPA Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

URAIAN	2021	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI KE-8
Rupiah Murni		
Belanja Pegawai	6.497.345.000,00	6.481.498.000,00
Belanja Barang	15.304.849.000,00	13.424.923.000,00
Belanja Modal	0,00	5.500.000,00
Jumlah Belanja	21.802.194.000,00	19.911.921.000,00
Hibah		
Belanja Barang	0,00	1.422.431.000,00
Jumlah Hibah	0,00	1.422.431.000,00
Total	21.802.194.000,00	21.334.352.000,00

1. Dipa Revisi ke-1 tanggal 25 Maret 2021, Revisi Kanwil atas penambahan pagu sebesar Rp1.712.675.000,00, penambahan Pagu tersebut sehubungan dengan Hibah langsung Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah dan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur;
2. Dipa Revisi ke-2 Tanggal 4 Juni 2021, Revisi DJA adanya Penyesuaian Uang Makan PPNPNS, Revisi POK dan Revisi Halaman III DIPA menyebabkan adanya perubahan Pagu dari semula

- Rp23.514.869.000,00 menjadi Rp23.373.057.000,00 atau ada pengurangan sebesar Rp141.812.000,00;
3. DIPA Revisi ke-3 Tanggal 12 Juli 2021, Revisi Kanwil adanya Revisi POK dan Revisi Halaman III DIPA;
 4. DIPA Revisi ke-4 Tanggal 6 Agustus 2021, Revisi DJA adanya *Refocusing* Anggaran atas revisi ini menyebabkan total Pagu berkurang yang semula Rp23.373.057.000,00 menjadi Rp22.252.190.000,00 atau terjadi pemotongan Belanja Barang sebesar Rp1.120.867.000,00;
 5. DIPA Revisi Ke-5 Tanggal 22 September 2021, Revisi optimalisasi atas Anggaran Program Dukungan Manajemen yang menyebabkan perubahan Pagu dari semula Rp22.252.190.000,00 menjadi Rp21.624.596.000,00. Pengurangan Pagu Belanja Pegawai sebesar Rp627.594.000,00;
 6. DIPA Revisi Ke-6 Tanggal 3 November 2021, Revisi DJA atas Percepatan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Akhir Tahun Anggaran;
 7. DIPA Revisi Ke-7 Tanggal 30 November 2021, Revisi Kanwil atas revisi halaman III DIPA dan revisi POK;
 8. DIPA Revisi Ke-8 Tanggal 28 Desember 2021, Revisi Kanwil atas Penyesuaian Hibah yang menyebabkan pengurangan jumlah DIPA yang berasal dari Hibah langsung sebesar Rp290.244.000,00 dan dilakukan revisi POK.

B.1 Pendapatan

Realisasi Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021
Pendapatan adalah sebesar Rp70.745.194,00. Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan
Rp70.745.194,00 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2021

URAIAN	Estimasi	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0,00	876.765,00	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0,00	69.868.429,00	-
Jumlah	0,00	70.745.194,00	-

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp70.745.194,00 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diperoleh dari :

1. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (jasa giro) sebesar Rp876.765,00 merupakan jasa giro yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan Bulan Desember atas rekening yang menampung dana hibah kegiatan pengawasan tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang disetorkan pada tanggal 5 Januari 2021 dengan nomor NTPN 6E1EA0N9V8CKT9LF
2. Penerimaan kembali Belanja Barang TAYL atas tindak lanjut Audit Operasional yang dilakukan Inspektorat Wilayah III sebesar Rp67.868.429,00 dan tindak lanjut hasil Reviu Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Tahun 2019 oleh BPKP perwakilan Provinsi Kep. Bangka Belitung sebesar Rp2.000.000,00 yang seluruh nya telah dilakukan penyetoran pada bulan Juni 2021 dan November 2021 ke kas negara dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL per 31 Desember 2021

No	Kabupaten	Tanggal Setor	NTPN	Nilai
1	Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung	25-Jun-21	041A31JNF37RBUBD	3.350.000,00
2	Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung	17-Jun-21	A5C4A7QLTT8AV3T0	5.094.472,00
3	Bawaslu Kabupaten Bangka Barat	24-Jun-21	CC1D02G4UTQ6MP7U	1.314.000,00
4	Bawaslu Kabupaten Bangka Barat	21-Jun-21	D20007QLTT8F0KED	14.962.500,00
5	Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan	21-Jun-21	EC69461QU83M6MTA	3.990.000,00
6	Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah	23-Jun-21	399BD7QLTT8G1NKC	350.000,00
7	Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah	23-Jun-21	A3F427QLTT8G1OP8	30.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

No	Kabupaten	Tanggal Setor	NTPN	Nilai
8	Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah	23-Jun-21	AD1CD8N3DNQSEPMV	9.025.000,00
9	Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah	28-Jun-21	FDFO648VUIV1JLSO	6.750.000,00
10	Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	22-Jun-21	6A3F761QU83N7D92	5.700.000,00
14	Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah	9-Nov-21	4914D0N9V93RPL8S	1.080.000,00
11	Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah	9-Nov-21	740758N3DO9BEKVF	7.904.274,00
12	Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah	9-Nov-21	9D1FF6U8E34IKKKF	1.268.183,00
13	Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah	9-Nov-21	A143C0N9V93RPJ9E	7.050.000,00
15	Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung	2-Nov-21	9D6028N3DO95UBRR	2.000.000,00
Total				69.868.429,00

Penjelasan lebih lanjut mengenai Penerimaan kembali belanja barang TAYL berasal dari hasil temuan audit operasional atas Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2020 oleh inspektorat wilayah III dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengembalian atas kelebihan pembayaran Uang Saku RDK tahun anggaran 2020 pada Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung sebesar Rp3.350.000,00;
2. Pengembalian atas kelebihan pembayaran Pengadaan Seragam tahun anggaran 2020 pada Bawaslu Kep. Bangka Belitung sebesar Rp5.094.472,00;
3. Pengembalian atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas Bawaslu Kabupaten Bangka Barat tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.314.000,00;
4. Pengembalian atas kelebihan pembayaran Honor Pokja Bawaslu Kabupaten Bangka Barat tahun anggaran 2020 sebesar Rp14.962.500,00;
5. Pengembalian atas kelebihan pembayaran Honor Pokja Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan tahun anggaran 2020 sebesar Rp3.990.000,00;
6. Pengembalian atas kelebihan pembayaran Uang Saku RDK Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah tahun anggaran 2020 sebesar Rp350.000,00;
7. Pengembalian atas kelebihan pembayaran Sewa Meubelair dan peralatan kantor Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah tahun anggaran 2020 sebesar Rp30.000,00;

8. Pengembalian atas kelebihan pembayaran Honor Pokja Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah tahun anggaran 2020 sebesar Rp9.025.000,00;
9. Pengembalian atas kelebihan pembayaran Jasa Iklan Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah tahun anggaran 2020 sebesar Rp6.750.000,00;
10. Pengembalian atas kelebihan pembayaran Honor Pokja Bawaslu Kabupaten Belitung Timur tahun anggaran 2020 sebesar Rp5.700.000,00;
11. Pengembalian atas pembayaran kelebihan Uang Saku Kegiatan Bimtek Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.080.000,00;
12. Pengembalian atas kelebihan pembayaran Pengadaan Sticker Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp7.904.274,00;
13. Pengembalian atas selisih pengadaan seminar kitt (MUG) Kegiatan Sosialisasi Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.268.183,00;
14. Pengembalian atas selisih pengadaan X-Banner Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp7.050.00,00;
15. Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu yang berasal dari hasil revidi Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang dilakukan oleh BPKP perwakilan Provinsi Kep. Bangka Belitung. Pengembalian kelebihan pembayaran Honor Narasumber Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2019 sebesar Rp2.000.000,00.

Selanjutnya realisasi pendapatan sampai dengan 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami peningkatan 109,55 persen sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	876.765,00	33.760.747,00	(97,40)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	69.868.429,00	0,00	-
Total	70.745.194,00	33.760.747,00	109,55

Peningkatan pendapatan pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 disebabkan adanya penerimaan pendapatan yang berasal dari Penyetoran atas kelebihan pembayaran Belanja Barang tahun 2020 yang disetorkan pada tahun 2021 atas tindak lanjut hasil Audit Operasional Inspektorat Wilayah III dan hasil rewiu kinerja Pengelolaan Keuangan tahun 2019.

B.2 Belanja

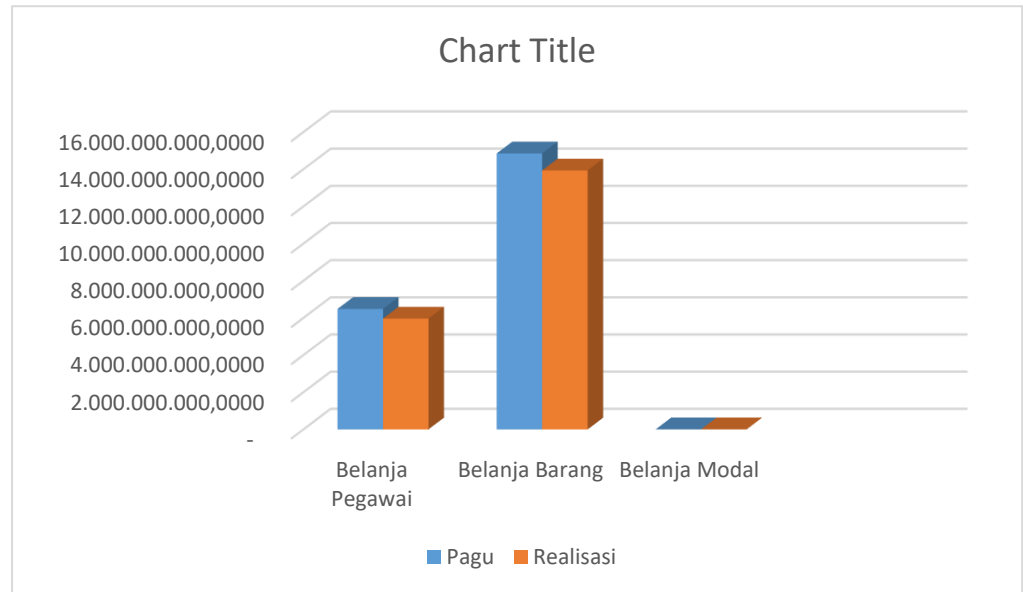
*Realisasi Belanja
Negara
Rp19.900.944.400,
00*

Realisasi Belanja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp19.900.944.400,00 atau 93,28 persen dari anggaran belanja sebesar Rp21.334.352.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2021

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	6.481.498.000,00	5.963.167.925,00	92,00
Belanja Barang	14.847.354.000,00	13.932.411.609,00	93,84
Belanja Modal	5.500.000,00	5.450.000,00	99,09
Total Belanja Kotor	21.334.352.000,00	19.901.029.534,00	93,28
Pengembalian Belanja	-	85.134	-
Total	21.334.352.000,00	19.900.944.400,00	93,28

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut :



Realisasi belanja berdasarkan program sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Program	2021		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			
Rupiah Murni	4.217.415.000,00	3.987.702.008,00	94,55
Hibah Langsung Dalam Negeri	1.422.431.000,00	1.421.927.295,00	99,96
Program Dukungan Manajemen			
Rupiah Murni	15.694.506.000,00	14.491.315.097,00	92,33
Total	21.334.352.000,00	19.900.944.400,00	93,28

Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 52 persen jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020 hal ini disebabkan oleh:

1. Menurunnya jumlah kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2021 dikarenakan sempat adanya PPKM level 4 untuk Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung sehingga digantikan kegiatan secara daring.

2. Pada Tahun 2021 pelaksanaan tahapan PILKADA hanya dilaksanakan selama 3 bulan karena hanya penetapan calon terpilih sedangkan pada tahun 2020 tahapan PILKADA dilaksanakan 12 bulan.
3. Adanya Pengurangan Pagu dikarenakan adanya *Refocusing* Anggaran terkait penanganan Pandemi COVID-19 dan adanya Optimalisasi Anggaran Belanja Pegawai.

Realisasi Belanja 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	5.963.165.541,00	5.233.674.822,00	13,94
Belanja Barang	13.932.328.859,00	35.597.189.837,00	(60,86)
Belanja Modal	5.450.000,00	627.691.000,00	(99,13)
Jumlah	19.900.944.400,00	41.458.555.659,00	(52,00)

Rekapitulasi belanja negara sebesar Rp19.900.944.400,00 merupakan hasil pengurangan dari realisasi belanja bruto sebesar Rp19.901.029.534,00 dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp85.134,00 Pengembalian belanja sebesar Rp85.134,00 merupakan pengembalian belanja tahun anggaran berjalan yang terdiri dari :

1 Belanja Pegawai sebesar	Rp	2.384,00
2 Belanja Barang sebesar	Rp	82.750,00
Jumlah	Rp	85.134,00

Pengembalian Belanja Pegawai sebesar Rp2.384 berasal dari Pengembalian Belanja Sebesar Rp1.800,00 dan Potongan SPM sebesar Rp584,00. Pengembalian Belanja Pegawai sebesar Rp1.800,00 berasal dari kelebihan pembayaran Uang Kehormatan Komisioner Bawaslu Kabupaten Belitung dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pengembalian Belanja Pegawai per 31 Desember 2021

No	Kode	Uraian	No NTPN	Tanggal Setor	Jumlah (Rp)
1	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	6E1EA0N9V8CKT9LF	29-Mar-21	1.800,00

Potongan SPM sebesar Rp584,00 merupakan potongan SPM atas pembayaran kekurangan Gaji dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Potongan SPM Kekurangan Gaji per 31 Desember 2021

No	Uraian	Kode	Uraian	SP2D	Tanggal Setor	Jumlah (Rp)
1	Pembayaran Kekurangan Gaji Induk Pegawai Bln Februari dan Maret atas kenaikan KGB 6 Orang	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	210151303000551	07-Apr-21	164,00
2	Pembayaran Kekurangan Gaji Induk Pegawai Bln Maret dan April atas KGB 2 Orang	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	210151303000811	05-May-21	120,00
3	Pembayaran Kekurangan Gaji Induk Pegawai Bln April s.d. November atas kenaikan Pangkat	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	210151303002813	17-Nov-21	300,00
Total						584,00

Pengembalian belanja barang sebesar Rp82.750,00 merupakan pengembalian belanja atas kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pengembalian Belanja Barang Per 31 Desember 2021

No	Kode	Uraian	SP2D	Tanggal Setor	Jumlah (Rp)
1	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	E43492G4UUC91D1I	30-Dec-21	82.750,00
Total					82.750,00

Belanja Pegawai **B.3 Belanja Pegawai**

Rp5.963.165.541,00

Realisasi Belanja Pegawai Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.963.165.541,00 atau 92 persen dari Anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp6.481.498.000,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS). Rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Naik (Turun) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	1.198.177.000,00	879.056.035,00	73,37
Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	4.082.642.000,00	4.081.348.000,00	99,97
Beban Uang Lembur	244.560.000,00	136.403.100,00	55,77
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	956.119.000,00	866.360.790,00	90,61
Jumlah Bruto	6.481.498.000,00	5.963.167.925,00	92,00
Pengembalian Belanja Pegawai	0,00	2.384,00	-
Jumlah Belanja	6.481.498.000,00	5.963.165.541,00	92,00

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5.963.165.541,00 dan Rp5.233.674.822,00 atau mengalami peningkatan sebesar 13,94 persen hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya Pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi Pejabat Eselon II, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Adanya Kenaikan Gaji Berkala untuk PNS Organik Bawaslu Kepulauan Bangka Belitung;
3. Adanya Pembayaran Tunjangan Kinerja Untuk PNS DPK Bawaslu Provinsi yang sebelumnya di bayarkan oleh pemerintah Daerah sebanyak 4 Orang;

4. Adanya Kenaikan Pembayaran Tunjangan Kinerja Bagi yang dilantik menjadi Jabatan Fungsional;
5. Adanya PNS DPK yang berubah status menjadi PNS Organik Bawaslu sebanyak 2 Orang a.n Zainal Muttaqin dan Roy M Siagian;
6. Adanya Pembayaran Tunjangan Anak dan Tunjangan Suami/Istri untuk PNS yang menikah sebanyak 2 Orang;
7. Adanya Pembayaran Gaji, Tunjangan Kinerja dan Uang Makan bagi CPNS sebanyak 6 orang pada bulan oktober 2021 yang sebelumnya di bayarkan oleh Bawaslu RI.

*Perbandingan Belanja Pegawai
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	439.026.960,00	332.105.940,00	32,19
Belanja Pembulatan Gaji PNS	9.947,00	5.988,00	66,12
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	25.940.016,00	14.160.970,00	83,18
Belanja Tunj. Anak PNS	4.360.092,00	972.570,00	348,31
Belanja Tunj. Struktural PNS	111.650.000,00	77.585.000,00	43,91
Belanja Tunj. PPh PNS	2.700.180,00	28.625.930,00	(90,57)
Belanja Tunj. Beras PNS	21.870.840,00	11.369.940,00	92,36
Belanja Uang Makan PNS	252.478.000,00	241.487.000,00	4,55
Belanja Tunjangan Umum PNS	21.020.000,00	16.580.000,00	26,78
Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	4.081.348.000,00	4.039.129.700,00	1,05
Belanja Uang Lembur	136.403.100,00	38.090.000,00	258,11
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	866.360.790,00	435.176.310,00	99,08
Jumlah Belanja Kotor	5.963.167.925,00	5.235.289.348,00	13,90
Pengembalian Belanja Pegawai	2.384,00	1.614.526,00	(99,85)
Jumlah Belanja	5.963.165.541,00	5.233.674.822,00	13,94

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.963.165.541,00 dipergunakan untuk :

1. Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari s.d. Desember 2021 sebanyak 12 bulan dan Pembayaran Gaji CPNS bulan Oktober s.d. Desember 2021 sebanyak 3 bulan;
2. Pembayaran Uang Kehormatan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi; dan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Januari s.d. Desember 2021 sebanyak 12 bulan;
3. Pembayaran Tunjangan Kinerja PNS organik dan PNS DPK Bawaslu Provinsi Bulan Januari s.d. Desember 2021 sebanyak 12 bulan dan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Pembayaran Tunjangan Kinerja CPNS bulan September s.d. Desember 2021 sebanyak 4 bulan;

4. Pembayaran Tunjangan Hari Raya Pejabat Eselon II, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi; Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten dan PNS Organik sebanyak 1 kali;
5. Pembayaran Gaji Ke-13 untuk Pejabat Eselon II, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi; Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten dan PNS Organik sebanyak 1 kali;
6. Pembayaran Uang Makan PNS Organik, PNS DPK bulan Januari s.d. Desember 2021 sebanyak 12 Bulan dan CPNS bulan September s.d. Desember 2021 sebanyak 4 bulan;
7. Pembayaran Tunjangan Struktural bulan Januari s.d. Desember 2021 sebanyak 12 bulan; dan
8. Pembayaran Lembur dan uang makan lembur selama tahun 2021.

Belanja Pegawai sebesar Rp5.963.165.541,00 merupakan hasil pengurangan dari realisasi Belanja Pegawai Bruto sebesar Rp5.963.167.925,00 dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp2.384,00 dengan rincian sebagai berikut :

Pengembalian Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara Rp 1.800,00

Potongan SPM atas Pembayaran Kekurangan Gaji Rp 584,00

Total	Rp	2.384,00
--------------	-----------	-----------------

Pengembalian Belanja sebesar Rp1.800,00 merupakan Pengembalian kelebihan Pembayaran Uang Kehormatan Pejabat Negara 3 Komisioner Kabupaten Belitung bulan Januari dan Februari, dengan nomer NTPN sebagai berikut :

No	Kode	Uraian	No NTPN	Tanggal Setor	Jumlah (Rp)
1	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	6E1EA0N9V8CKT9LF	29-Mar-21	1.800,00

Sedangkan potongan SPM sebesar Rp584,00 merupakan Potongan SPM atas Pembayaran kekurangan Gaji Induk Pegawai bulan Februari dan Maret 2021 atas KGB Riska dkk (6 Orang), Pembayaran Kekurangan Gaji Induk Pegawai bulan Maret dan April 2021 atas KGB Rogrius dkk (2 Orang) dan Pembayaran Kekurangan Gaji Induk Pegawai bulan April s.d. November 2021 atas kenaikan Pangkat Zainal Muttaqin, berikut no SP2D atas potongan SPM tersebut :

No	Akun	Uraian	No SP2D	Tanggal SP2D	Jumlah (Rp)
1	511119	Pembayaran Kekurangan Gaji Induk Pegawai Bln Februari dan Maret atas KGB Riska dkk (6 Org)	210151303000551	7-Apr-21	164,00
2	511119	Pembayaran Kekurangan Gaji Induk Pegawai Bln Maret dan April atas KGB Rogrius dkk (2 Org)	210151303000811	5-May-21	120,00
3	511119	Pembayaran Kekurangan Gaji Induk Pegawai Bln April s.d. November atas kenaikan Pangkat a.n Zainall Muttaqin	210151303002813	17-Nov-21	300,00
Total					584,00

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp13.932.328.859,
00

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp13.932.328.859,00 atau 93,84 persen dari anggaran Belanja Barang sebesar Rp14.847.354.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	7.666.908.000,00	7.190.914.895,00	93,79
Belanja Barang Non Operasional	1.058.390.000,00	970.935.948,00	91,74
Belanja Barang Persediaan	63.300.000,00	60.549.000,00	95,65
Belanja Jasa	1.614.432.000,00	1.433.660.616,00	88,80
Belanja Pemeliharaan	631.014.000,00	595.275.194,00	94,34
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3.813.310.000,00	3.681.075.956,00	96,53
Jumlah Belanja Kotor	14.847.354.000,00	13.932.411.609,00	93,84
Pengembalian Belanja	0,00	82.750,00	-
Total	14.847.354.000,00	13.932.328.859,00	93,84

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp13.932.328.859,00 dan Rp35.603.424.136,00 Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 60,86 persen hal ini disebabkan oleh :

1. Pada tahun 2021 tahapan PILKADA dilaksanakan selama 3 bulan karena hanya tahapan penetapan calon terpilih sedangkan di tahun 2020 Tahapan PILKADA dilaksanakan selama 12 bulan;
2. Masih berlanjutnya pandemi COVID-19 yang menyebabkan turunnya instensitas kegiatan tatap muka dan digantikan dengan kegiatan secara daring, juga masih diberlakukannya Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat (PPKM); dan
3. Pemotongan Pagu atau *Refocusing* untuk penanganan Pandemi Covid-19.
4. Berkurangnya Belanja Sewa atas kendaraan operasional Bawaslu Kabupaten pada tahun 2021 menjadi 7 Unit sedangkan di tahun 2020 21 Unit.
5. Pada tahun 2021 tidak ada realisasi belanja Sewa untuk Gedung, Meubelair dan Peralatan kantor Panwascam karena telah selesainya tahapan PILKADA pada bulan Maret 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	7.666.908.000,00	7.190.914.895,00	93,79
Belanja Barang Non Operasional	1.058.390.000,00	970.935.948,00	91,74
Belanja Barang Persediaan	63.300.000,00	60.549.000,00	95,65
Belanja Jasa	1.614.432.000,00	1.433.660.616,00	88,80
Belanja Pemeliharaan	631.014.000,00	595.275.194,00	94,34
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3.813.310.000,00	3.681.075.956,00	96,53
Jumlah Belanja Kotor	14.847.354.000,00	13.932.411.609,00	93,84
Pengembalian Belanja	0,00	82.750,00	-
Total	14.847.354.000,00	13.932.328.859,00	93,84

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.932.328.859,00 merupakan belanja neto dari belanja bruto sebesar Rp13.932.411.609,00 dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp82.750,00. Belanja Barang sebesar Rp13.932.328.859,00 terdiri dari realisasi Belanja Barang yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp12.510.401.564,00 dan Hibah Langsung Dalam Negeri sebesar Rp1.421.927.295,00.

Belanja Barang

(RM)

Rp12.510.401.564,

00

B.4.1 Belanja Barang (RM)

Realisasi Belanja Barang (RM) per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp12.510.401.564,00 atau 93,19 persen dari Anggaran sebesar Rp13.424.923.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2021

URAIAN	2021		% Realisasi
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Barang Operasional	7.206.139.000,00	6.730.156.095,00	93,39
Belanja Barang Non Operasional	871.752.000,00	784.569.598,00	90,00
Belanja Barang Persediaan	63.300.000,00	60.549.000,00	95,65
Belanja Jasa	1.477.217.000,00	1.296.483.267,00	87,77
Belanja Pemeliharaan	624.869.000,00	589.152.194,00	94,28
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3.181.646.000,00	3.049.574.160,00	95,85
Jumlah Belanja Kotor	13.424.923.000,00	12.510.484.314,00	93,19
Pengembalian Belanja	0,00	82.750,00	-
Total	13.424.923.000,00	12.510.401.564,00	93,19

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp12.510.401.564,00 dan Rp14.242.745.610,00. Realisasi Belanja Barang RM mengalami penurunan sebesar 12,16 persen hal ini di sebabkan oleh :

1. Tidak adanya Belanja Persediaan ATK pada Kabupaten/Kota;

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

2. Berkurangnya Belanja Sewa Kendaraan Operasional Kabupaten/Kota yang semula 21 Unit menjadi 7 Unit;
3. Berkurangnya biaya pemeliharaan karena berkurangnya Belanja BBM kendaraan Operasional Kabupaten/Kota yang disebabkan berkurangnya unit kendaraan operasional di Kabupaten/Kota.

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	REALISASI		% Naik (Turun)
	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	
Belanja Barang Operasional	6.730.156.095,00	7.976.740.162,00	(15,63)
Belanja Barang Non Operasional	784.569.598,00	394.544.650,00	98,85
Belanja Barang Persediaan	60.549.000,00	263.119.901,00	(76,99)
Belanja Jasa	1.296.483.267,00	1.804.061.772,00	(28,14)
Belanja Pemeliharaan	589.152.194,00	891.484.074,00	(33,91)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3.049.574.160,00	2.919.029.350,00	4,47
Jumlah Belanja Kotor	12.510.484.314,00	14.248.979.909,00	(12,20)
Pengembalian Belanja	82.750,00	6.234.299,00	(98,67)
Total	12.510.401.564,00	14.242.745.610,00	(12,16)

Realisasi belanja barang (RM) sebesar Rp12.510.401.564,00 dipergunakan untuk :

1. Belanja Barang Operasional digunakan untuk
 - a. Belanja keperluan Perkantoran yang digunakan untuk Honorarium PPNPNS, Honorarium Korsek dan Staf PNS Kabupaten/Kota, Jamuan Tamu, Pembayaran langganan Internet, Lembur PPNPNS dan kebutuhan operasional kantor lainnya;
 - b. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat digunakan untuk keperluan pengiriman berkas dan lain-lain;
 - c. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja, Belanja Barang Operasional Lainnya; dan

- d. Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi digunakan untuk belanja Paket data dan aplikasi zoom sampai dengan 1 tahun;
2. Belanja Barang Non Operasional digunakan untuk;
 - a. Belanja Bahan berupa belanja ATK, Komputer supply, spanduk kegiatan, dan penggandaan untuk keperluan kegiatan;
 - b. Belanja Honor Output Kegiatan;
 - c. Belanja Barang Non Operasional Lainnya; dan
 - d. Belanja Barang Non operasional Penanganan Pandemi COVID-19 yang digunakan untuk rapid test dan PCR test untuk keperluan perjalanan dinas.
3. Belanja Barang Persediaan
 - a. Belanja barang persediaan konsumsi belanja ATK dan computer supply untuk keperluan operasional kantor;
 - b. belanja barang persediaan penanganan pandemi COVID-19 yang berupa Handsaitizer dan Cairan Desinfektan.
4. Belanja Jasa digunakan untuk belanja
 - a. Belanja langganan Listrik
 - b. Belanja langganan Telepon
 - c. Belanja langganan Air
 - d. Belanja Sewa Gedung kantor untuk Bawaslu Kota Pangkalpinang, Bawaslu Kab. Bangka, Bawaslu Kab. Bangka Tengah, Bawaslu Kab. Bangka Selatan, Bawaslu Kab. Bangka Barat;
 - e. Belanja Sewa Kendaraan Operasional Sebanyak 7 Unit yang di sebar ke 7 Kabupaten/Kota;
 - f. Belanja Jasa Profesi digunakan untuk belanja Narasumber Kegiatan
 - g. Belanja Jasa Lainnya
 - h. Belanja Jasa- Penanganan Pandemi COVID-19 yaitu jasa penyemprotan kantor menggunakan pihak ke tiga.

5. Belanja Pemeliharaan dipergunakan untuk
 - a. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang digunakan untuk pemeliharaan Gedung pinjam Pakai kantor Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Belitung dan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin adalah belanja atas perbaikan barang inventaris kantor, BBM operasional kendaraan dinas Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/kota dan Pembayaran Pajak atas kendaraan dinas
6. Belanja perjalanan dinas dalam negeri digunakan untuk
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk Perjalan dinas dalam rangka undangan, monitoring dan supervisi ke Bawaslu Kabupaten; Pelaporan atau konsultasi ke Bawaslu RI dan Koordinasi dengan instansi lain
 - b. Belanja Perjalanan Dinas dalam kota digunakan untuk monitoring dan supervisi ke Bawaslu Kota Pangkalpinang, dinas dalam rangka undangan maupun koordinas yang berasal dari wilayah kota Pangkalpinang;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota digunakan untuk belanja kegiatan yang berupa sewa hotel maupun belanja uang saku dan transport kegiatan yang dilaksanakan di Hotel yang masih berada di wilayah pangkalpinang.

Realisasi belanja barang (RM) sebesar Rp12.510.401.564,00 merupakan hasil pengurangan dari realisasi belanja bruto sebesar Rp12.510.484.314,00 dikurangi atas pengembalian belanja barang sebesar Rp82.750, Pengembalian ini berasal dari kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode	Uraian	No NTPN	Tanggal Setor	Jumlah (Rp)
1	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	E43492G4UUC91D1I	30-Dec-21	82.750,00
Total					82.750,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Dari Realisais Belanja Barang (RM) sebesar Rp12.510.401.564,00,00 terdapat realisasi belanja yang digunakan dalam rangka penanganan pandemic COVID-19 senilai Rp279.683.488,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar Rp161.803.488,00 dipergunakan untuk belanja
 - a. Belanja APD berupa masker dan handsanitizer untuk keperluan kegiatan;
 - b. Pengadaan lisensi aplikasi *video conference* sebanyak satu akun untuk setiap Bawaslu kabupaten/kota dan Bawaslu Provinsi sampai dengan 1 tahun;
 - c. Pengadaan paket data komunikasi yang diberikan dalam bentuk uang bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - d. Test Antigen untuk keperluan jika ada Pegawai Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang terkonfirmasi positif.
2. Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp88.897.000,00 dipergunakan untuk belanja Rapid test maupun PCR tes untuk keperluan Perjalanan dinas.
3. Belanja Barang Persediaan – Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp25.583.000,00 dipergunakan untuk belanja
 - a. Belanja Persediaan Handsanitizer untuk keperluan persediaan Kantor
 - b. Belanja Persediaan Desinfektan untuk keperluan persediaan Kantor
4. Belanja Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp2.900.000,00 dipergunakan untuk belanja Jasa Penyemprotan yang menggunakan pihak ke tiga.

Belanja Barang **B.4.2 Belanja Barang (HDN)**
(HDN)

Rp1.421.927.295,00
0

Realisasi Belanja Barang (HDN) per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.421.927.295,00 atau 99,98 persen dari Anggaran sebesar Rp1.422.246.350,00 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

URAIAN	2021		% Realisasi
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Barang Operasional	460.769.000,00	460.758.800,00	99,99
Belanja Barang Non Operasional	186.453.350,00	186.366.350,00	99,95
Belanja Jasa	137.215.000,00	137.177.349,00	99,97
Belanja Pemeliharaan	6.145.000,00	6.123.000,00	99,64
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	631.664.000,00	631.501.796,00	99,97
Jumlah Belanja Kotor	1.422.246.350,00	1.421.927.295,00	99,98
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	-
Total	1.422.246.350,00	1.421.927.295,00	99,98

Realisasi Belanja Barang HDN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.421.927.295,00 dan Rp21.354.444.227,00. Realisasi Belanja HDN per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 93,34 persen hal ini disebabkan pada tahun 2021 Tahapan PILKADA dilaksanakan selama 3 bulan karna hanya tahapan penetapan calon terpilih sedangkan pada tahun 2020 Tahapan PILKADA dilaksanakan selama 12 bulan

Perbandingan Realisasi Belanja Barang (HDN) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	REALISASI		% Naik (Turun)
	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	
Belanja Barang Operasional	460.758.800,00	7.291.101.679,00	(93,68)
Belanja Barang Non Operasional	186.366.350,00	5.028.842.710,00	(96,29)
Belanja Jasa	137.177.349,00	1.980.668.135,00	(93,07)
Belanja Pemeliharaan	6.123.000,00	43.286.000,00	(85,85)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	631.501.796,00	7.010.545.703,00	(90,99)
Total	1.421.927.295,00	21.354.444.227,00	(93,34)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Realisasi belanja barang (HDN) sebesar Rp1.421.927.295,00 dipergunakan untuk Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di 4 Kabupaten dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi HDN 31 Desember 2021 (Rp)	%
1	Bawaslu Kabupaten Bangka Barat	473.403.000,00	473.371.620,00	99,99%
2	Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan	305.120.000,00	304.846.945,00	99,91%
3	Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah	431.519.000,00	431.455.280,00	99,99%
4	Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	212.389.000,00	212.253.450,00	99,94%
Total		1.422.431.000,00	1.421.927.295,00	99,96%

Dari Realisasi Hibah Dalam Negeri Sebesar Rp1.421.927.295,00 dipergunakan untuk

1. Belanja Barang Operasional digunakan untuk belanja Keperluan Perkantoran (Honorarium Komisioner Panwascam) dan Honorarium Pengelola keuangan kabupaten dan panwascam;
2. Belanja Barang Non Operasional digunakan untuk belanja Belanja Bahan (belanja ATK, Foto Copy, Jamuan Tamu, konsumsi rapat, dan pencetakan), Belanja Honor Output Kegiatan (honorarium pokja) dan Belanja Barang Non operasional – Penanganan Pandemi COVID-19 digunakan untuk belanja rapid test dan per test untuk kepentingan perjalanan dinas;
3. Belanja Jasa digunakan untuk belanja langganan listrik panwascam, belanja langganan telpon panwascam, belanja langganan air panwascam, Belanja Sewa (belanja sewa gedung kantor, meubeulair, dan Peralatan kantor panwascam), Belanja Jasa Profesi digunakan untuk pembayaran honor narasumber, Belanja Daya dan Jasa Lainnya (Belanja langganan Internet) dan Belanja Jasa Lainnya;
4. Belanja Pemeliharaan dipergunakan untuk Belanja BBM Genset; dan
5. Belanja perjalanan dinas dalam negeri digunakan untuk belanja Perjalanan dinas biasa yang digunakan untuk perjalanan dinas dalam

rangka undangan, konsultasi dan panggilan sidang, belanja perjalanan dinas dalam kota digunakan untuk supervisi dan monitoring ke Panwascam, dan belanja perjalanan dinas Paket meeting dalam kota digunakan untuk sewa gedung kegiatan dan pembayaran Uang Saku dan Transport.

Dari realisasi belanja barang (HDN) sebesar Rp1.421.927.295,00 terdapat realisasi belanja yang digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp14.170.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Realisasi Belanja Barang (HDN) dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 per 31 Desember 2021

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	14.170.000,00
Total		14.170.000,00

Belanja Barang dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang bersumber dari hibah dalam negeri dipergunakan untuk Rapid Test Antigen dan PCR Test untuk keperluan perjalanan Dinas.

*Belanja Modal
Rp5.450.000,00*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.450.000,00 atau 99 persen dari anggaran belanja sebesar Rp5.500.000,00. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Rincian Belanja Modal per 31 Desember 2021

URAIAN	REALISASI		% Naik (Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.500.000,00	5.450.000,00	99,09
Jumlah Belanja Kotor	5.500.000,00	5.450.000,00	99,09
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Total	5.500.000,00	5.450.000,00	99,09

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.450.000,00 seluruhnya berasal dari sumber dana rupiah murni. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5.500.000,00 dan Rp627.691.000,00. Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 99,13 persen jika dibandingkan dengan Realisasi per 31 Desember 2020 hal ini karena adanya pemotongan anggaran terkait pandemi Covid-19.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.450.000,00	359.619.000,00	(98,48)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	94.308.000,00	(100,00)
Belanja Modal Lainnya	0,00	173.764.000,00	(100,00)
Jumlah Belanja	5.450.000,00	627.691.000,00	(99,13)

B.5.1 Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5.450.000,00 dan Rp359.619.000,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 98,48 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19

Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.450.000,00	359.619.000,00	(98,48)
Jumlah Belanja Kotor	5.450.000,00	359.619.000,00	(98,48)
Pengembalian	0,00	0,00	0,00
Total	5.450.000,00	359.619.000,00	(98,48)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.450.000,00 digunakan untuk belanja Alat Studio Lainnya berupa seperangkat alat *Pod Cast*.

B.5.2 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp94.308.000,00

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	94.308.000,00	(100)
Total	0,00	94.308.000,00	(100)

Pada periode 31 Desember 2021 tidak ada realisasi Belanja Modal dan Bangunan.

B.5.3 Realisasi Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp173.764.000,00

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	
Belanja Modal Lainnya	0,00	173.764.000,00	(100)
Total	0,00	173.764.000,00	(100)

Pada periode 31 Desember 2021 tidak ada realisasi Belanja Modal Lainnya pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas Lainnya
dan Setara Kas
Lainnya Rp0,00

C.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp4.421.215.885,00 Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Keterangan	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	876.765,00
Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	0,00	4.420.339.120,00
Total	0,00	4.421.215.885,00

Pada periode 31 Desember 2021 tidak terdapat kas lainnya dibendahara pengeluaran maupun kas lainnya di kementerian negara/lembaga dari hibah dikarenakan tidak ada penerimaan hibah maupun saldo kas yang berasal dari jasa giro yang belum di setor.

Belanja dibayar
dimuka Rp0,00

C.2 Belanja dibayar dimuka

Saldo belanja dibayar dimuka per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp180.356.000,00. Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang atau jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja dibayar dimuka adalah sebagai berikut :

Rincian Belanja di bayar dimuka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jenis	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Belanja Sewa Kendaraan	0,00	0,00
Belanja Sewa Peralatan dan Meubelair	0,00	128.956.000,00
Belanja Sewa Gedung	0,00	51.400.000,00
Total	0,00	180.356.000,00

Pada periode 31 Desember 2021 tidak ada saldo Belanja dibayar di muka karena Belanja Sewa Peralatan dan Meubelair dan Belanja Sewa Gedung Panwascam telah selesai pada bulan Maret 2022.

*Persediaan
Rp0,00*

C.3 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Atas saldo Persediaan tahun 2021 berikut mutasinya :

Mutasi Nilai Persediaan per 31 Desember 2021

Saldo per 1 Januari 2021	0,00
Mutasi tambah :	
Pembelian	60.549.000,00
Hibah (Masuk)	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00
Mutasi Kurang :	
Pemakaian	60.549.000,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00
Barang Usang	0,00
Saldo per 31 Desember 2021	0,00

Penjelasan atas mutasi Persediaan sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Mutasi Tambah

Pembelian sebesar Rp60.549.000,00 merupakan pembelian yang

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

diperoleh dari akun :

Pembelian Persediaan Berdasarkan Akun per 31 Desember 2021

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Persediaan Konsumsi	34.966.000,00
2	Persediaan Lainnya	25.583.000,00
Total		60.549.000,00

Rincian pembelian Persediaan Konsumsi sebesar Rp34.966.000,00 dapat dilihat pada Lampiran I, sedangkan rincian atas pembelian Persediaan Lainnya adalah sebagai berikut :

Rincian atas pembelian Persediaan Lainnya 31 Desember 2021

No	NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN	TOTAL
1	Hand Sanitizer	1	100.000,00	100.000,00
2	Hand Sanitizer	5	45.000,00	225.000,00
3	Hand Sanitizer	10	100.000,00	1.000.000,00
4	Hand Sanitizer	4	62.500,00	250.000,00
5	Hand Sanitizer	5	100.000,00	500.000,00
6	Desinfektan	2	300.000,00	600.000,00
7	Hand Sanitizer	4	62.500,00	250.000,00
8	Hand Sanitizer	3	35.000,00	105.000,00
9	Hand Sanitizer	2	35.000,00	70.000,00
10	Hand Sanitizer 500ml	5	60.000,00	300.000,00
11	Antiseptic Gel 5L	1	350.000,00	350.000,00
12	Hand Sanitizer SOS	1	192.000,00	192.000,00
13	Desinfektan	2	300.000,00	600.000,00
14	Hand Sanitizer	3	100.000,00	300.000,00
15	Hand Sanitizer	10	75.000,00	750.000,00
16	Hand Sanitizer	1	100.000,00	100.000,00
17	Desinfektan	1	300.000,00	300.000,00
18	Hand Sanitizer	4	62.500,00	250.000,00
19	Desinfektan	5	70.000,00	350.000,00
20	Hand Sanitizer	5	75.000,00	375.000,00
21	Desinfektan	5	70.000,00	350.000,00
22	Hand Sanitizer	2	100.000,00	200.000,00
23	Desinfektan	1	300.000,00	300.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN	TOTAL
24	Desinfektan	6	300.000,00	1.800.000,00
25	Desinfektan	5	300.000,00	1.500.000,00
26	Hand Sanitizer	11	100.000,00	1.100.000,00
27	Hand Sanitizer	5	70.000,00	350.000,00
28	Desinfektan	11	70.000,00	770.000,00
29	Hand Sanitizer	3	75.000,00	225.000,00
30	Hand Sanitizer Nuvo	17	23.000,00	391.000,00
31	Hand Sanitizer Instance	1	45.000,00	45.000,00
32	Hand Sanitizer	3	100.000,00	300.000,00
33	Desinfektan	1	300.000,00	300.000,00
34	Hand Sanitizer	4	62.500,00	250.000,00
35	Desinfektan	10	70.000,00	700.000,00
36	Desinfektan Secret Clean	20	30.000,00	600.000,00
37	Desinfektan	4	70.000,00	280.000,00
38	Hand Sanitizer	7	30.000,00	210.000,00
39	Hand Sanitizer	2	60.000,00	120.000,00
40	Desinfektan	10	70.000,00	700.000,00
41	Desinfektan	1	300.000,00	300.000,00
42	Hand Sanitizer	10	100.000,00	1.000.000,00
43	Desinfektan	5	300.000,00	1.500.000,00
44	Desinfektan	3	75.000,00	225.000,00
45	Desinfektan	4	125.000,00	500.000,00
46	Desinfektan	5	300.000,00	1.500.000,00
47	Hand Sanitizer	10	100.000,00	1.000.000,00
48	Desinfektan Stella	10	35.000,00	350.000,00
49	Desinfektan	10	175.000,00	1.750.000,00
Total		260	6.280.000,00	25.583.000,00

Mutasi Keluar

Pemakaian persediaan sebesar Rp60.549.000,00 merupakan pemakaian atas persediaan dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Persediaan Konsumsi	34.966.000,00
2	Persediaan Lainnya	25.583.000,00
Total		60.549.000,00

Rincian Pemakaian Persediaan Konsumsi adalah sebagai berikut :

Rincian Pemakaian Persediaan Konsumsi per 31 Desember

Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp)
Box Arsip/Kotak Arsip	8	168.000,00
Box File	6	132.000,00
Buku Agenda	1	9.000,00
Catridge 4 Color	2	370.000,00
Cutter Besar	2	34.000,00
Flashdisk 16 GB	10	1.160.000,00
Gunting Sedang	1	7.000,00
Isi Staples 24/6	27	135.000,00
Kalkulator	6	1.200.000,00
Kertas HVS A4	26	5.355.400,00
KERTAS HVS F4 BARU	9	2.379.000,00
Lem UHU Stik B	2	26.000,00
Materai 10.000	5	55.000,00
Odner/Map	1	311.000,00
Ordner Folio	5	1.559.000,00
Paper Clip No.5	2	68.000,00
Pena	15	1.293.000,00
Penggaris besi	1	5.600,00
Post It	2	68.000,00
Remover Kanguru	4	68.000,00
Sign Here Joyko	11	125.000,00
Stabillo	4	37.000,00
Sticker	1	32.000,00
Stop Map	5	125.000,00
Trigonal Paper Clips	2	34.000,00
Amplop	34	516.000,00
Baterai	4	1.097.000,00
Map	15	644.000,00
Staples	3	147.000,00
Tinta	17	2.138.000,00
Toner	30	15.000.000,00
Trigonal	4	68.000,00
White	2	600.000,00
Total	267	34.966.000,00

sedangkan rincian pemakaian Persediaan Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian atas pemakaian Persediaan Lainnya per 31 Desember 2021

Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp)
Antiseptic Gel 5L	1	350.000,00
Desinfektan	91	14.325.000,00
Desinfektan Secret Clean	20	600.000,00
Desinfektan Stella	10	350.000,00
Hand Sanitizer	114	9.030.000,00
Hand Sanitizer 500ml	5	300.000,00
Hand Sanitizer Instance	1	45.000,00
Hand Sanitizer Nuvo	17	391.000,00
Hand Sanitizer SOS	1	192.000,00
Total	260	25.583.000,00

C.4 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar masing-masing Rp9.515.880.360,00 dan Rp10.136.683.860,00. Adapun rincian saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Peralatan dan Mesin 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Peralatan dan Mesin	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Alat Bantu	97.001.000,00	97.001.000,00
Alat Angkutan Darat Bermotor	3.231.399.550,00	3.231.399.550,00
Alat Kantor	916.451.500,00	948.381.500,00
Alat Rumah Tangga	2.414.312.220,00	2.545.424.220,00
Alat Studio	369.422.900,00	442.110.400,00
Alat Komunikasi	17.754.300,00	19.254.300,00
Alat Kedokteran	43.598.000,00	43.598.000,00
Komputer Unit	2.005.151.090,00	2.155.269.590,00
Peralatan Komputer	420.789.800,00	618.245.300,00
TOTAL	9.515.880.360,00	10.136.683.860,00

Rincian Peralatan dan Mesin sebesar Rp9.515.880.360,00 dapat dilihat pada Lampiran II. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	10.136.683.860,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	5.450.000,00
Reklasifikasi Masuk	51.098.000,00
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi Keluar	(51.098.000,00)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(626.253.500,00)
Saldo per 31 Desember 2021	9.515.880.360,00
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021	(7.296.807.024,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	2.219.073.336,00

Mutasi Tambah :

1. Pembelian

Belanja Peralatan dan Mesin sebesar RP5.450.000,00 merupakan pembelian Alat Studio Lainnya berupa seperangkat alat *Pod Cast*.

2. Reklasifikasi Masuk

Reklasifikasi Aset masuk sebesar Rp51.098.000 merupakan reklasifikasi masuk atas Lemari Besi yang sebelumnya tercatat sebagai Filling Cabinet Besi dan Thermometer Gun yang sebelumnya tercatat sebagai Termometer Mercury Untuk Suhu Badan dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Kuantitas	Nilai
1	Lemari Besi/Metal	Buah	3	7.500.000,00
2	Thermometer Gun	Unit	23	43.598.000,00
Total				51.098.000,00

Mutasi Kurang :

1. Reklasifikasi Keluar

Reklasifikasi keluar sebesar Rp51.098.000 merupakan reklasifikasi keluar atas Filling Cabinet Besi yang dicatatkan menjadi Lemari Besi

dan Termometer Mercury untuk Suhu Badan yang dicatatkan menjadi Thermo Gun dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Kuantitas	Nilai
1	Filling Cabinet Besi	Buah	3	7.500.000,00
2	Termometer Mercury Untuk Suhu Badan	Unit	23	43.598.000,00
Total				51.098.000,00

2. Reklasifikasi Ke Aset Lainnya

Reklasifikasi Aset Tetap Ke Aset Lainnya disebabkan oleh pemberhentian peralatan dan mesin yang mengalami rusak berat senilai Rp626.253.500,00. Rincian Peralatan dan Mesin yang diberhentikan karena rusak berat dapat dilihat pada Lampiran III.

Gedung dan

C.5 Gedung dan Bangunan

Bangunan

Rp94.308.000,0

0

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar masing-masing Rp94.308.000,00 dan Rp94.308.000,00. Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp94.308.000,00 merupakan Pagar Semi Permanen untuk Tanah yang berlokasi di Kabupaten Bangka Tengah dengan rincian sebagai berikut :

Perbandingan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Pagar Semi Permanen	94.308.000,00	94.308.000,00
Total		94.308.000,00	94.308.000,00

Tidak ada mutasi tambah maupun kurang Gedung dan Bangunan untuk 31 Desember 2021 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	94.308.000,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Saldo per 31 Desember 2021	94.308.000,00
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021	(2.829.240,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	91.478.760,00

Jalan, Jaringan dan Irigasi **C.6 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp8.000.000,00 dan Rp8.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Perbandingan Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Instalasi Lain (Kabel, TP Link dan alat pendukung lainnya)	8.000.000,00	8.000.000,00
Total		8.000.000,00	8.000.000,00

Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas Jalan, Irigasi dan Jaringan ini untuk 31 Desember 2021, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	8.000.000,00
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Saldo per 31 Desember 2021	8.000.000,00
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021	(6.933.334,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	1.066.666,00

C.7 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Dalam Renovasi

Rp59.950.000,0 per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp59.950.000,00 dan Rp1.021.212.114,00 dengan rincian sebagai berikut :

*Perbandingan Aset Tetap Lainnya
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

No	Nama	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Aset Tetap Lainnya	59.950.000,00	1.021.212.114,00
Total		59.950.000,00	1.021.212.114,00

Aset tetap lainnya senilai Rp59.950.000,00 merupakan Gedung dan Bangunan dalam renovasi yang terdapat di Bawaslu Kabupaten Belitung Timur dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2021

No	Nama Barang	Identitas ATR	Kedudukan	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)
1	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	Penyekatan Ruang	Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	2020	59.950.000,00
Total					59.950.000,00

Mutasi atas Aset tetap Lainnya sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	1.021.212.114,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	0,00
Mutasi kurang:	
Hibah (Keluar)	(961.262.114,00)
Saldo per 31 Desember 2021	59.950.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2021	59.950.000,00

Penjelasan atas Mutasi

Mutasi Kurang

Hibah (Keluar) sebesar Rp961.262.114,00 merupakan Hibah keluar atas Aset Tetap Renovasi Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur yang di serahkan kepada

Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Pemerintah Daerah Belitung Timur sebagai pemilik Gedung dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Hibah (Keluar) Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2021

No	Identitas ATR	NPHD	BAST	Penerima Hibah	Harga Perolehan (Rp)
1	Parkir Kendaraan	980/2/Bakuda/2021 dan 019/PL.08/BB/02/2021 23 Februari 2021	030/0002/Bakuda dan 020/PL.08/BB/022021 23 Februari 2021	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	62.707.114,00
2	Rehap Atap Gedung				175.200.000,00
3	Ruang SentraGakkumdu				116.210.000,00
4	Ruang Arsip				95.700.000,00
5	Penyekatan Ruangan				119.297.000,00
6	Konblok Parkiran				29.831.000,00
7	Ruang Arsip				95.403.000,00
8	Ruang Kerja Pegawai				118.966.000,00
9	Ruang Kerja pegawai				98.814.000,00
10	Ruang Rapat	008/PL.08/BB/01/2021 dan 900/01/NPHD/II/2021 tanggal 19 Januari 2021	030/0002/Bakuda dan 020/PL.08/BB/02/2021 tanggal 19 Januari 2021	Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur	49.134.000,00
Total					961.262.114,00

C.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp7.306.569.598,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp7.306.569.598,00 dan Rp6,499.682.768,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Akumulasi yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

31 Desember 2021

No	Aset Tetap	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	7.296.807.024,00	6.492.339.687,00
2	Gedung dan Bangunan	2.829.240,00	943.080,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

No	Aset Tetap	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.933.334,00	6.400.001,00
4	Aset Tetap Lainnya	0	0
Total		7.306.569.598,00	6.499.682.768,00

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	9.515.880.360,00	7.296.807.024,00	2.219.073.336,00
2	Gedung dan Bangunan	94.308.000,00	2.829.240,00	91.478.760,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.000.000,00	6.933.334,00	1.066.666,00
4	Aset Tetap Lainnya	59.950.000,00	0,00	59.950.000,00
Akumulasi Penyusutan		9.678.138.360,00	7.306.569.598,00	2.371.568.762,00

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada Lampiran IV.

C.9 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp27.000.000,00

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp 27.000.000,00 dan Rp 27.000.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Adapun saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Aset Tak berwujud 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Nama	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Aplikasi Penatausahaan Kearsipan	6.000.000,00	6.000.000,00
2	Aplikasi SARAB Panwas Kab/Kota	21.000.000,00	21.000.000,00
Total		27.000.000,00	27.000.000,00

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	27.000.000,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	27.000.000,00
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2021	(27.000.000,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	0,00

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud TA 2021

Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
Aplikasi Penatausahaan Kearsipan	6.000.000,00
Aplikasi SARAB Panwas Kab/Kota	21.000.000,00
Jumlah	27.000.000,00
Akumulasi Peny. Amortisasi/Aset Lainnya	27.000.000,00
Nilai Buku	0,00

*Aset Lain-Lain
Rp626.253.500,
00*

C.10 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp626.253.500,00 dan Rp0,00. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang merupakan Peralatan dan Mesin dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta akan diajukan Penghapusan ke Bawaslu RI pada bulan Oktober 2021. Perbandingan Aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Perbandingan Aset Lain-Lain 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Aset Tetap yang Tidak Lagi Digunakan dalam Operasional Pemerintah	626.253.500,00	0,00
TOTAL		626.253.500,00	0,00

Rincian atas Aset tetap yang tidak lagi digunakan dalam operasional Pemerintah adalah sebagai berikut:

*Rincian Aset tetap yang tidak lagi digunakan dalam operasional
Pemerintah*

No	Uraian	Satuan	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Lemari Besi/Metal	Buah	1	2.500.000,00
2	Lemari Kayu	Buah	1	2.000.000,00
3	Rak Besi	Buah	6	11.550.000,00
4	Filing Cabinet Besi	Buah	1	2.100.000,00
5	White Board	Buah	1	1.040.000,00
6	Alat Penghancur Kertas	Buah	1	1.500.000,00
7	LCD Projector/Infocus	Buah	3	36.350.000,00
8	Papan Pengumuman	Buah	2	10.890.000,00
9	Meja Kerja Kayu	Buah	5	6.401.500,00
10	Kursi Besi/Metal	Buah	89	47.138.500,00
11	Meja Rapat	Buah	2	11.340.000,00
12	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	1	3.500.000,00
13	A.C. Split	Buah	1	4.000.000,00
14	Kipas Angin	Buah	3	2.048.000,00
15	Microphone	Buah	2	5.600.000,00
16	Mic Conference	Buah	1	2.650.000,00
17	Dispenser	Buah	4	6.900.000,00
18	Handy Cam	Buah	2	10.750.000,00
19	Gordyin/Kray	Buah	25	23.286.000,00
20	DVD Player	Buah	4	2.925.000,00
21	Alat Rumah Tangga Lainnya	Buah	1	4.573.000,00
22	Microphone/Wireless MIC	Buah	1	11.750.000,00
23	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	12	35.550.000,00
24	Voice Recorder	Buah	2	2.600.000,00
25	Camera Digital	Buah	5	22.837.500,00
26	Alat Studio Lainnya	Buah	1	5.400.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

No	Uraian	Satuan	Kuantitas	Nilai (Rp)
27	Facsimile	Buah	1	1.500.000,00
28	P.C Unit	Buah	9	81.600.000,00
29	Lap Top	Buah	8	68.518.500,00
30	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	19	40.120.500,00
31	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	6	143.930.000,00
32	Server	Buah	1	10.600.000,00
33	Hub	Buah	1	1.485.000,00
34	Acces Point	Buah	1	1.320.000,00
TOTAL			223	626.253.500,00

Adapun mutasi aset lain-lain yang tidak digunakan dalam pemerintahan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	0,00
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya	626.253.500,00
Mutasi kurang:	
	0,00
Saldo per 31 Desember 2021	626.253.500,00

C.11 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi

Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Rp638.323.063,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp638.323.063,00 dan Rp24.375.000,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya adalah sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021

No	Aset Lainnya	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
A	Aset Tak Berwujud		
1	Aplikasi Penata usahaan Kearsipan	6.000.000,00	6.000.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

No	Aset Lainnya	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
2	Aplikasi SARAB Panwas Kab/Kota	21.000.000,00	18.375.000,00
Jumlah		27.000.000,00	24.375.000,00
B	Aset Lain-Lain		0,00
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	611.323.063,00	0,00
Jumlah		611.323.063,00	0,00
Total		638.323.063,00	24.375.000,00

Rincian Akumulasi Penyusutan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Aplikasi Penata usahaan Kearsipan	6.000.000,00	(6.000.000,00)	0
2	Aplikasi SARAB Panwas Kab/Kota	21.000.000,00	(21.000.000,00)	0
Jumlah		27.000.000,00	(27.000.000,00)	0
B	Aset Lain-Lain			
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah	626.253.500,00	(611.323.063,00)	14.930.437,00
Jumlah		626.253.500,00	(611.323.063,00)	14.930.437,00
TOTAL		653.253.500,00	(638.323.063,00)	14.930.437,00

Utang kepada pihak ketiga Rp16.896.053,00

C.12 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp16.896.053,00 dan Rp13.284.050,00 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari belanja barang yang masih harus di bayar dan Belanja Pegawai yang masih harus di bayar dengan rincian sebagai berikut :

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Barang yg Masih Harus di Bayar	13.738.957,00
2	Belanja Pegawai yg Masih Harus Di Bayar	3.157.096,00
	Total	16.896.053,00

Utang Kepada Pihak Ketiga yang berasal dari Belanja Barang yang Masih Harus Di Bayar berasal dari tagihan bulan Desember yang di bayarkan bulan Januari atas Langganan Listrik, Internet, Telepon dan Air dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Tagihan Listrik Bulan Desember	5.736.940,00
2	Tagihan Internet Bulan Desember	7.685.998,00
3	Tagihan Telpon Bulan Desember	85.569,00
4	Tagihan Air Bulan Desember	230.450,00
	Total	13.738.957,00

Sedangkan Utang Kepada Pihak Ketiga yang berasal dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Di Bayar berasal dari 20% Gaji Pokok, Tunjangan Suami dan Tunjangan Anak CPNS yang telah dilantik menjadi PNS pada 1 Desember 2021, rincian Utang Kepada Pihak Ketiga yang berasal dari Belanja Pegawai yang Masih Harus Di Bayar adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Banyak	Nilai (Rp)
1	Gaji Pokok	6 Org	3.095.190,00
2	Tunjangan Suami	1 Org	51.588,00
3	Tunjangan Anak	1 Org	10.318,00
	Total		3.157.096,00

Ekuitas

C.14 Ekuitas

Rp2.369.603.146,00

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.369.603.146,00 dan Rp9.351.434.041,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

sebesar Rp2.386.499.199,00 dan kewajiban sebesar Rp16.896.053,00
Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan
Ekuitas.

Pendapatan **D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

PNBP Rp0,00 **D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp47.505.911,00 dengan rincian sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Pendapatan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	% Naik (Turun)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0,00	47.505.911,00	(100)
Total	0,00	47.505.911,00	(100)

Terjadi penurunan Pendapatan Negara Bukan Pajak di periode 31 Desember 2021 hal ini disebabkan di tahun 2021 tidak ada pengelolaan rekening penerimaan Hibah Dalam Negeri yang menyebabkan tidak ada lagi penerimaan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro), selanjutnya dapat dijelaskan bahwa terdapat perbedaan realisasi pendapatan negara bukan pajak yang tercantum pada LO dan LRA per 31 Desember 2021. Pada LO tercantum PNBP sebesar Rp0,00 sedangkan pada LRA tercantum sebesar Rp876.765,00 terdapat selisih sebesar Rp876.765,00 selisih tersebut merupakan jasa giro bulan desember tahun 2020 yang disetorkan pada bulan Januari tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Mutasi Tambah:			
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) LRA	Rp	876.765,00	
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	876.765,00	
Mutasi Kurang:			
Jurnal Balik Atas Penyetoran Pendapatan Jasa Giro Tahun Anggaran Yang Lalu :	(Rp	876.765,00)	
Jumlah Mutasi Kurang	(Rp	876.765,00)	
Jumlah Pendapatan per 31 Desember 2021	Rp	0,00	

D.2 Beban Pegawai

Beban

Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5.966.322.637,00 dan Rp5.233.674.822,00.

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Rp5.966.322.637,00 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	442.122.150	332.105.940	33,13
Beban Pembulatan Gaji PNS	9.363,00	5.462,00	82,11
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	25.991.604,00	14.160.970,00	83,54
Beban Tunj. Anak PNS	4.370.410,00	972.570,00	349,37
Beban Tunj. Struktural PNS	111.650.000,00	77.585.000,00	43,91
Beban Tunj. PPh PNS	2.700.180,00	28.625.930,00	(90,57)
Beban Tunj. Beras PNS	21.870.840,00	11.369.940,00	92,36
Beban Uang Makan PNS	252.478.000,00	241.487.000,00	4,55
Beban Tunjangan Umum PNS	21.020.000,00	16.210.000,00	29,67
Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	4.081.346.200,00	4.039.129.700,00	1,05
Beban Lembur Beban Uang Lembur	136.403.100,00	38.090.000,00	258,11
Beban Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	866.360.790,00	433.932.310,00	99,65
Jumlah Beban	5.966.322.637,00	5.233.674.822,00	14,00

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat terjadi peningkatan beban pegawai Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 jika dibandingkan dengan 2020 sebesar 14 persen, hal ini disebabkan sebagai berikut :

1. Adanya Pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi Pejabat Eselon II, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Adanya Kenaikan Gaji Berkala untuk PNS Organik Bawaslu Kepulauan Bangka Belitung;
3. Adanya Pembayaran Tunjangan Kinerja Untuk PNS DPK Bawaslu Provinsi yang sebelumnya di bayarkan oleh pemerintah Daerah sebanyak 4 Orang;
4. Adanya PNS DPK yang telah berubah status menjadi organic sebanyak 2 orang yaitu a.n Zainal Muttaqin dan Roy M Siagian;
5. Adanya Pembayaran Tunjangan Anak dan Tunjangan Suami/Istri untuk PNS yang menikah sebanyak 2 Orang;

6. Adanya Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja CPNS pada bulan Oktober untuk 6 Orang yang sebelumnya di bayarkan oleh Bawaslu RI.

Terdapat perbedaan Beban Pegawai pada LO dengan LRA per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Mutasi Tambah:		
Belanja Pegawai (LRA)	Rp	5.963.165.541,00
Tunggakan Gaji Pokok untuk Bulan Desember 2021	Rp	3.095.190,00
Tunggakan Tunjangan Suami untuk Bulan Desember 2021		51.588,00
Tunggakan Tunjangan Anak untuk Bulan Desember 2021		10.318,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	5.966.322.637,00
Mutasi Kurang:		
	Rp	0
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	0
Jumlah Pendapatan per 31 Desember 2021	Rp	5.966.322.637,00

Penjelasan Mutasi Tambah

Tunggakan Gaji Pokok, Tunjangan Suami dan Tunjangan Anak merupakan sisa 20% dari Gaji pokok, Tunjangan Suami dan Tunjangan Anak yang seharusnya sudah di bayar 1 Desember 2021 karena Pelantikan CPNS menjadi PNS pada tanggal 1 Desember 2021.

Beban

D.3 Beban Persediaan

*Persediaan
Rp60.549.000,
00*

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp60.549.000,00 dan Rp381.370.882,00. Beban persediaan per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 84,12 persen jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020 hal ini di sebabkan oleh tidak adanya persediaan di kabupaten/kota seiring dengan penurunan kegiatan karena pada tahun 2021 penyelenggaraan PILKADA hanya 3 bulan sedangkan pada tahun 2020 12 bulan, persediaan yang disediakan kabupaten/kota hanya persediaan terkait penanganan pandemi covid. Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	34.966.000,00	381.370.882,00	(90,83)
Beban Persediaan Lainnya	25.583.000,00	0,00	-
Jumlah	60.549.000,00	381.370.882,00	(84,12)

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Beban Persediaan Konsumsi adalah Beban atas penggunaan ATK dan lain-lain sedangkan Beban Persediaan Lainnya yang merupakan Beban Barang Persediaan – Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp25.583.000,00 digunakan untuk Persediaan Hand Sanitizer sebesar Rp10.308.000,00 dan Cairan Desinfektan sebesar Rp15.275.000,00 yang tersebar di Bawaslu Provinsi maupun di Bawaslu Kabupaten/Kota.

Mutasi atas Beban Persediaan

Saldo per 1 Januari 2021	0,00
Mutasi tambah :	
Pembelian Persediaan Konsumsi	34.966.000,00
Pembelian Persediaan Lainnya	25.583.000,00
Mutasi Kurang :	
Saldo Persediaan per 31 Desember	0,00
Beban Persediaan Per 31 Desember 2021	60.549.000,00

Tidak ada perbedaan Beban Persediaan pada laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran.

Beban Barang dan Jasa D.4 Beban Barang dan Jasa

dan Jasa

Rp9.776.322.3

66,00

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp9.776.322.366,00 dan Rp25.700.047.719,00.

Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	6.479.842.297,00	13.448.156.772,00	(51,82)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10.601.250,00	7.644.200,00	38,68
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	395.900.000,00	648.150.000,00	(38,92)
Beban Barang Operasional Lainnya	143.579.000,00	586.501.500,00	(75,52)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	161.803.488,00	577.079.369,00	(71,96)
Beban Bahan	818.598.948,00	3.237.113.360,00	(74,71)
Beban Honor Output Kegiatan	49.270.000,00	2.151.020.000,00	(97,71)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	103.067.000,00	32.854.000,00	213,71
Beban Langganan Listrik	179.904.245,00	244.730.252,00	(26,49)
Beban Langganan Telepon	8.693.012,00	29.023.500,00	(70,05)
Beban Langganan Air	4.195.310,00	14.400.364,00	(70,87)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	8.633.650,00	42.075.533,00	(79,48)
Beban Jasa Konsultan	0,00	15.000.000,00	(100,00)
Beban Sewa	1.248.294.000,00	3.741.770.833,00	(66,64)
Beban Jasa Profesi	82.100.000,00	313.285.000,00	(73,79)
Beban Jasa Lainnya	78.440.166,00	306.049.036,00	(74,37)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	3.400.000,00	305.194.000,00	(98,89)
Jumlah Belanja	9.776.322.366,00	25.700.047.719,00	(61,96)

Terdapat penurunan Beban Barang dan Jasa sebesar 61,69 persen hal ini disebabkan oleh sebagai berikut :

1. Tidak adanya pelaksanaan Pokja terkait tahapan Pemilihan sehingga menyebabkan beban honor output kegiatan menurun sangat signifikan;
2. Berkurangnya sewa Kendaraan Operasional Kabupaten/Kota yang pada tahun 2020 3 unit per Kabupaten/Kota menjadi 1 unit di tahun 2021;

3. Sehubungan tidak adanya pelaksanaan PILKADA menyebabkan tidak ada nya sewa Gedung, Meubelair dan Peralatan Kantor untuk Panwascam pada tahun 2021;
4. Tidak ada nya sewa rumah pejabat struktural eselon IV untuk tahun 2021;
5. Berkurang nya sewa gedung Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi 5 Kabupaten/Kota dimana pada tahun 2020 6 Kabupaten/Kota;
6. Tidak adanya pembayaran Honorarium Narasumber maupun Moderator untuk Ketua, Anggota, dan Pejabat Struktural untuk acara internal yang diselenggarakan oleh Bawaslu; dan
7. Menurun nya pembayaran Honor Operasional satuan kerja karena total Pagu Anggaran yang menurun di tahun 2021.

Dari Beban Barang Operasional senilai Rp9.776.322.366,00 terdapat Beban untuk penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp268.270.488,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Beban Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp161.803.488,00 yang digunakan untuk :
 - a. Pengadaan Masker;
 - b. Bantuan Komunikasi berupa Paket data/pulsa;
 - c. Masker Medis untuk keperluan Kegiatan (tidak masuk kriteria persediaan);
 - d. Handsanitizer untuk keperluan Kegiatan (tidak masuk kriteria persediaan); dan
 - e. Pengadaan Lisensi aplikasi *video conference* sampai dengan 1 Tahun.
2. Beban Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi COVID 19 sebesar Rp103.067.000,00 digunakan untuk keperluan rapid test maupun PCR test dalam rangka syarat melakukan perjalanan dinas;
3. Beban Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp3.400.000,00 digunakan untuk jasa penyemprotan Disinfektan oleh pihak ke-3.

Terdapat perbedaan Belanja Barang dan Jasa pada Laporan Realisasi Anggaran jika dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa pada Laporan Operasional per 31 Desember 2021, berikut penjelasannya :

Mutasi Tambah:		
Belanja Beban dan Jasa (LRA)	Rp	9.595.511.459,00
Sewa Dibayar Dimuka 31 Desember 2020	Rp	180.356.000,00
Tunggakan Listrik bulan Desember 2021	Rp	5.736.940,00
Tunggakan Internet bulan Desember 2021	Rp	7.685.998,00
Tunggakan Telpon Desember 2021	Rp	85.569,00
Tunggakan Air bulan Desember 2021	Rp	230.450,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	9.789.606.416,00
Mutasi Kurang:		
Jurnal Balik atas Beban Listrik Tahun yang Lalu	Rp	(5.978.922,00)
Jurnal Balik atas Beban Internet Tahun yang Lalu	Rp	(6.874.858,00)
Jurnal Balik atas Beban Telepon Tahun Yang Lalu	Rp	(254.045,00)
Jurnal Balik atas Beban Air Tahun yang Lalu	Rp	(176.225,00)
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	(13.284.050,00)
Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021	Rp	9.776.322.366,00

Penjelasan atas perbedaan Belanja Barang dan Jasa dengan Beban Barang dan Jasa terdapat pada akun sebagai berikut :

1. Beban Sewa pada LO sebesar Rp1.248.294.000,00 sedangkan pada LRA sebesar Rp1.067.938.000,00 terdapat perbedaan yang disebabkan oleh adanya jurnal balik atas saldo sewa dibayar dimuka tahun 2020 yang habis pada bulan februari 2021 sebesar Rp180.356.000,00
2. Beban langganan Listrik pada LO sebesar Rp179.904.245,00 sedangkan pada LRA sebesar Rp180.146.227,00 perbedaan tersebut dikarenakan ada pencatatan tunggakan untuk listrik bulan desember 2021 yg di bayarkan pada januari 2022 sebesar Rp5.736.940,00 dan adanya jurnal balik atas Beban Listrik tahun 2020 sebesar Rp5.978.922,00
3. Beban Barang Operasional pada LO sebesar Rp6.479.842.297,00 sedangkan pada LRA sebesar Rp6.479.031.157,00 perbedaan tersebut dikarenakan ada pencatatan tunggakan internet bulan desember 2021 yang dibayarkan bulan januari 2022 sebesar RP7.685.998,00 dan adanya jurnal baik atas Beban Langganan Internet tahun 2020 sebesar Rp6.874.858,00

4. Beban Telepon pada LO sebesar Rp8.693.012,00 sedangkan pada LRA sebesar Rp8.861.488,00 perbedaan tersebut dikarenakan ada pencatatan tunggakan untuk telepon desember 2021 yang di bayarkan januari 2022 sebesar Rp85.569,00 dan adanya Jurnal balik atas beban Telepon tahun 2020 sebesar Rp254.045,00
5. Beban langganan Air pada LO sebesar Rp4.195.310,00 sedangkan pada LRA sebesar Rp4.141.085,00 perbedaan ini disebabkan oleh adanya pencatatan tunggakan air bulan desember 2021 yang di bayarkan januari 2022 sebesar Rp230.450,00 dan jurnal balik atas beban langganan air tahun 2020 sebesar Rp176.225,00

Beban

Pemeliharaan

Rp595.275.19

4,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp595.275.194,00 dan Rp943.770.074,00.

Perbandingan Beban Pemeliharaan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	101.884.000,00	173.863.800,00	(41,40)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	493.391.194,00	760.906.274,00	(35,16)
Jumlah	595.275.194,00	934.770.074,00	(36,32)

Terdapat penurunan Beban Pemeliharaan sebesar 36,32 persen hal ini disebabkan oleh

1. Berkurangnya kendaraan operasional yang berada pada Bawaslu Kabupaten/Kota yang semula 3 Unit untuk setiap Kabupaten/Kota menjadi 1 Unit per Kabupaten/Kota sehingga menurun nya penggunaan BBM maupun servis untuk kendaraan operasional.
2. Menurun nya Pemeliharaan Gedung pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena gedung yang digunakan masih berfungsi dengan baik.

Tidak terdapat perbedaan Beban Pemeliharaan pada Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran 31 Desember 2021.

D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp3.680.993.2
06,00*

Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.680.993.206,00 dan Rp9.926.050.754,00.

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	2.815.695.706,00	3.117.432.103,00	(9,68)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	190.312.500,00	2.123.432.500,00	(91,04)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	674.985.000,00	4.507.194.603,00	(85,02)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	177.991.548,00	(100,00)
Jumlah	3.680.993.206	9.926.050.754	(62,92)

Terdapat penurunan Beban Perjalanan Dinas sebesar 62,92 persen hal ini disebabkan oleh

1. Berkurangnya volume kegiatan karena tidak adanya Pelaksanaan Pemilihan baik itu PILKADA maupun Pemilu;
2. Adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada tahun 2021 dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk wilayah yang menerapkan PPKM level 4 sehingga banyak kegiatan yang dilakukan secara daring;
3. Berkurangkannya pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di hotel baik itu dalam kota maupun luar kota digantikan dengan memanfaatkan ruang rapat yang tersedia di masing-masing Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Tidak ada perbedaan Beban Perjalanan Dinas pada Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2021

*Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi*

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak

Rp1.420.834.893,00 berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.420.834.893,00 dan Rp1.644.144.061,00.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.404.371.762,00	1.636.667.647,00	(14,19)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.886.160,00	943.080,00	100,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	533.333,00	533.334,00	(0,00)
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Diunakkan	11.418.638,00		-
Jumlah Penyusutan	1.418.209.893,00	1.638.144.061,00	(13,43)
Beban Amortisasi Software	2.625.000,00	6.000.000,00	(56,25)
Jumlah Amortisasi	2.625.000,00	6.000.000,00	(56,25)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.420.834.893,00	1.644.144.061,00	(13,58)

Terdapat penurunan Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2021 sebesar 13,58 jika dibandingkan dengan tahun 2020 persen hal ini disebabkan oleh

1. Adanya penghentian Peralatan dan Mesin dikarenakan rusak berat senilai Rp626.253.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Provinsi/Kab/Kota	Nama Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Bangka	Kursi Besi/Metal	17	8.840.000,00
2	Bangka	P.C Unit	1	9.450.000,00
3	Bangka Barat	Kursi Besi/Metal	3	1.515.000,00
4	Bangka Selatan	Kipas Angin	1	685.000,00
5	Bangka Selatan	Kursi Besi/Metal	34	18.025.000,00
6	Bangka Selatan	Printer (Peralatan Personal Komputer	2	3.650.000,00
7	Bangka Tengah	Kursi Besi/Metal	4	2.000.000,00
8	Bangka Tengah	Lap Top	1	9.400.000,00
9	Bangka Tengah	Meja Kerja Kayu	1	950.000,00

No	Provinsi/Kab/ Kota	Nama Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
10	Belitung	Kipas Angin	1	670.000,00
11	Belitung	Kursi Besi/Metal	17	8.855.000,00
12	Belitung	P.C Unit	2	18.900.000,00
13	Belitung	Printer (Peralatan Personal Komputer	6	12.200.000,00
14	Belitung Timur	A.C. Split	1	4.000.000,00
15	Belitung Timur	Lap Top	2	17.921.500,00
16	Belitung Timur	P.C Unit	1	9.550.000,00
17	Belitung Timur	Printer (Peralatan Personal Komputer	2	3.690.000,00
18	Belitung Timur	Scanner (Peralatan Personal Komputer	1	11.900.000,00
19	Pangkalpinang	Kipas Angin	1	693.000,00
20	Pangkalpinang	Meja Kerja Kayu	1	951.500,00
21	Pangkalpinang	Printer (Peralatan Personal Komputer	3	5.625.000,00
22	Pangkalpinang	Scanner (Peralatan Personal Komputer	1	11.980.000,00
23	Provinsi	Acces Point	1	1.320.000,00
24	Provinsi	Alat Penghancur Kertas	1	1.500.000,00
25	Provinsi	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	4.573.000,00
26	Provinsi	Alat Studio Lainnya	1	5.400.000,00
27	Provinsi	Camera Digital	5	22.837.500,00
28	Provinsi	Dispenser	4	6.900.000,00
29	Provinsi	DVD Player	4	2.925.000,00
30	Provinsi	Facsimile	1	1.500.000,00
31	Provinsi	Filing Cabinet Besi	2	4.600.000,00
32	Provinsi	Gordyin/Kray	25	23.286.000,00
33	Provinsi	Handy Cam	2	10.750.000,00
34	Provinsi	Hub	1	1.485.000,00
35	Provinsi	Kursi Besi/Metal	14	7.903.500,00
36	Provinsi	Lap Top	5	41.197.000,00
37	Provinsi	LCD Projector/Infocus	3	36.350.000,00
38	Provinsi	Lemari Kayu	1	2.000.000,00
39	Provinsi	Meja Kerja Kayu	4	4.500.000,00
40	Provinsi	Meja Rapat	2	11.340.000,00
41	Provinsi	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	3.500.000,00
42	Provinsi	Mic Conference	1	2.650.000,00
43	Provinsi	Microphone	2	5.600.000,00
44	Provinsi	Microphone/Wireless MIC	1	11.750.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

No	Provinsi/Kab/Kota	Nama Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
45	Provinsi	P.C Unit	5	43.700.000,00
46	Provinsi	Papan Pengumuman	2	10.890.000,00
47	Provinsi	Printer (Peralatan Personal Komputer	6	14.955.500,00
48	Provinsi	Rak Besi	6	11.550.000,00
49	Provinsi	Scanner (Peralatan Personal Komputer	4	120.050.000,00
50	Provinsi	Server	1	10.600.000,00
51	Provinsi	Uninterruptible Power Supply (UPS	12	35.550.000,00
52	Provinsi	Voice Recorder	2	2.600.000,00
53	Provinsi	White Board	1	1.040.000,00
Total			224	548.238.500,00

2. Adanya Peralatan dan Mesin yang secara nilai buku sudah nol sehingga tidak dapat disusutkan lagi.

Tidak terdapat perbedaan antara jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada LO dengan selisih nilai kenaikan antara Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi pada Neraca.

Kegiatan Non

Operasional

(Rp891.393.68

5,00)

D.8 Kegiatan Non Operasional

Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing defisit Rp891.393.685,00 dan defisit Rp13.474.909,00 Adapun rincian nya sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	% Naik (Turun)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	2.159.999,00	(100,00)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	961.262.114,00	0,00	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(961.262.114,00)	2.159.999,00	(44.602,90)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya	69.868.429,00	62.906.300,00	11,07
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	(78.541.208,00)	(100,00)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	69.868.429,00	(15.634.908,00)	(546,87)
Jumlah Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(891.393.685,00)	(13.474.909,00)	6.515,21

Defisit dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2021 sebesar Rp891.393.685,00 diperoleh dari :

Mutasi Tambah :

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya yang berasal dari Penerimaan kembali belanja barang TAYL sebesar Rp69.868.429,00 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Penerimaan kembali Belanja barang TAYL

Per 31 Desember 2021

No	Kabupaten	Tanggal Setor	NTPN	Nilai
1	Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung	25-Jun-21	041A31JNF37RBUBD	3.350.000,00
2	Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung	17-Jun-21	A5C4A7QLTT8AV3T0	5.094.472,00
3	Bawaslu Kabupaten Bangka Barat	24-Jun-21	CC1D02G4UTQ6MP7U	1.314.000,00
4	Bawaslu Kabupaten Bangka Barat	21-Jun-21	D20007QLTT8F0KED	14.962.500,00
5	Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan	21-Jun-21	EC69461QU83M6MTA	3.990.000,00
6	Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah	23-Jun-21	399BD7QLTT8G1NKC	350.000,00
7	Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah	23-Jun-21	A3F427QLTT8G1OP8	30.000,00
8	Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah	23-Jun-21	AD1CD8N3DNQSEPMV	9.025.000,00
9	Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah	28-Jun-21	FDf0648VUIV1JLSO	6.750.000,00
10	Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	22-Jun-21	6A3F761QU83N7D92	5.700.000,00
14	Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung	2-Nov-21	9D6028N3DO95UBRR	2.000.000,00
11	Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah	9-Nov-21	4914D0N9V93RPL8S	1.080.000,00
12	Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah	9-Nov-21	740758N3DO9BEKVF	7.904.274,00
13	Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah	9-Nov-21	9D1FF6U8E34IKKKF	1.268.183,00
15	Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah	9-Nov-21	A143C0N9V93RPJ9E	7.050.000,00
Total				69.868.429,00

Penjelasan lebih lanjut mengenai Penerimaan kembali belanja barang TAYL adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu berasal dari hasil temuan audit operasional yang dilakukan inspektorat wilayah III dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pengembalian atas kelebihan pembayaran Uang Saku RDK tahun anggaran 2020 pada Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung sebesar Rp3.350.000,00;
 - b. Pengembalian atas kelebihan pembayaran Pengadaan Seragam tahun anggaran 2020 pada Bawaslu Kep. Bangka Belitung sebesar Rp5.094.472,00;

- c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas Bawaslu Kabupaten Bangka Barat tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.314.000,00;
- d. Pengembalian atas kelebihan pembayaran Honor Pokja Bawaslu Kabupaten Bangka Barat tahun anggaran 2020 sebesar Rp14.962.500,00;
- e. Pengembalian atas kelebihan pembayaran Honor Pokja Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan tahun anggaran 2020 sebesar Rp3.990.000,00;
- f. Pengembalian atas kelebihan pembayaran Uang Saku RDK Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah tahun anggaran 2020 sebesar Rp350.000,00;
- g. Pengembalian atas kelebihan pembayaran Sewa Meubelair dan peralatan kantor Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah tahun anggaran 2020 sebesar Rp30.000,00;
- h. Pengembalian atas kelebihan pembayaran Honor Pokja Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah tahun anggaran 2020 sebesar Rp9.025.000,00;
- i. Pengembalian atas kelebihan pembayaran Jasa Iklan Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah tahun anggaran 2020 sebesar Rp6.750.000,00;
- j. Pengembalian atas kelebihan pembayaran Honor Pokja Bawaslu Kabupaten Belitung Timur tahun anggaran 2020 sebesar Rp5.700.000,00;
- k. Pengembalian atas pembayaran kelebihan Uang Saku Kegiatan Bimtek Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.080.000,00
- l. Pengembalian atas kelebihan pembayaran Pengadaan Sticker Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp7.904.274,00;
- m. Pengembalian atas selisih pengadaan seminar kitt (MUG) Kegiatan Sosialisasi Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.268.183,00; dan

- n. Pengembalian atas selisih pengadaan X-Banner Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp7.050.000,00
2. Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu yang berasal dari hasil revidi Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang dilakukan oleh BPKP perwakilan Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan rincian sebagai berikut
 - a. Pengembalian atas kelebihan pembayaran Honor Narasumber Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2019 sebesar Rp2.000.000,00

Mutasi Kurang:

Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp961.262.114,00 berasal dari Beban Kerugian Pelepasan Aset yaitu Aset Tetap Renovasi yang telah dilakukan penyerahan Hibah kepada Pemerintah daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur dengan rincian sebagai berikut :

No	Asal Hibah	Identitas ATR	Penerima Hibah	Harga Perolehan (Rp)
1	Bawaslu Provinsi Kep. Babel	Parkir Kendaraan	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	62.707.114,00
2		Rehap Atap Gedung		175.200.000,00
3		Ruang Sentra Gakkumdu		116.210.000,00
4		Ruang Arsip		95.700.000,00
5		Penyekatan Ruangan		119.297.000,00
6		Konblok Parkiran		29.831.000,00
7		Ruang Arsip		95.403.000,00
8		Ruang Kerja Pegawai		118.966.000,00
9		Ruang Kerja Pegawai		98.814.000,00
10		Ruang Rapat	Pemerintah Kab. Belitung Timur	49.134.000,00
Total				961.262.114,00

Pos Luar Biasa **D.9 Pos Luar Biasa**

Rp0,00

Rincian Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00.

Surplus/ Defisit **D.10 Surplus/Defisit LO**

LO

(Rp22.391.690.9

81,00)

Defisit LO per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing defisit Rp22.391.690.981,00 dan defisit Rp43.786.027.310,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal E.1 Ekuitas Awal

Rp9.351.434.041,00 Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 1 Januari 2020 adalah masing-masing sebesar Rp9.351.434.041,00 dan Rp7.352.351.790,00.

Defisit LO E.2 Surplus (Defisit) LO

Rp22.391.690.981,00 Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing defisit sebesar Rp22.391.690.981,00 dan defisit Rp43.786.027.310,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi Yang Menambah /Mengurangi Ekuitas

Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

E.3.1. Koreksi Lain-lain

Rp2.998.411.825,00

Koreksi lain-lain pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar minus Rp2.998.411.825,00 dan Rp0,00. Perbandingan koreksi lain-lain adalah sebagai berikut :

Perbandingan Koreksi Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Keterangan	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Lain-lain	(2.998.411.825,00)	0,00
Total		(2.998.411.825,00)	0,00

Koreksi Lain-lain merupakan sisa dana Hibah 4 Kabupaten yang melaksanakan PILKADA yang tidak digunakan dan di kembalikan kepada Pemerintah Daerah masing-masing dan di sahkan melalui SP4HL dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Koreksi Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Penerima Hibah	Sisa Hibah Tahun 2020 (Rp)	SP2HL Tahun 2021 (Rp)	SP4HL (Rp)	Sisa Hibah (Rp)
1	Bangka Barat	952.996.877,00	473.371.620,00	479.625.257,00	0,00
2	Bangka Selatan	1.329.653.420,00	304.846.945,00	1.024.806.475,00	0,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

No	Penerima Hibah	Sisa Hibah Tahun 2020 (Rp)	SP2HL Tahun 2021 (Rp)	SP4HL (Rp)	Sisa Hibah (Rp)
3	Bangka Tengah	1.015.371.318,00	431.455.280,00	583.916.038,00	0,00
4	Belitung Timur	1.122.317.505,00	212.253.450,00	910.064.055,00	0,00
Total		4.420.339.120,00	1.421.927.295,00	2.998.411.825,00	0,00

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi

Antar Entitas
Rp18.408.271.911,00

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp18.408.271.911,00 dan Rp45.785.109.561,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN maupun K/L dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Ditagihkan ke Entitas Lain	18.479.017.105,00	20.104.111.432,00
2	Diterima dari Entitas Lain	(70.745.194,00)	(50.691.368,00)
3	Pengesahan Hibah Langsung	0,00	25.731.689.497,00
Jumlah		18.408.271.911,00	45.785.109.561,00

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL) / Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada Periode 31 Desember 2021, DDEL sebesar minus Rp70.745.194,00 merupakan pendapatan PNBPN tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian DDEL per 31 Desember 2021

No	Diterima dari Entitas Lain	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	(876.765,00)
2	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang lalu	(69.868.429,00)
Total		(70.745.194,00)

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (jasa giro) sebesar Rp876.765,00 merupakan jasa giro yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan Bulan Desember atas rekening yang menampung dana hibah kegiatan pengawasan tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang disetorkan pada tanggal 5 Januari 2021 dengan nomer NTPN 6E1EA0N9V8CKT9LF, sedangkan rincian atas Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL adalah sebagai berikut :

Rincian Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL 31 Desember 2021

No	Kabupaten	Tanggal Setor	NTPN	Nilai
1	Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung	25-Jun-21	041A31JNF37RBUBD	3.350.000,00
2	Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung	17-Jun-21	A5C4A7QLTT8AV3T0	5.094.472,00
3	Bawaslu Kabupaten Bangka Barat	24-Jun-21	CC1D02G4UTQ6MP7U	1.314.000,00
4	Bawaslu Kabupaten Bangka Barat	21-Jun-21	D20007QLTT8F0KED	14.962.500,00
5	Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan	21-Jun-21	EC69461QU83M6MTA	3.990.000,00
6	Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah	23-Jun-21	399BD7QLTT8G1NKC	350.000,00
7	Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah	23-Jun-21	A3F427QLTT8G1OP8	30.000,00
8	Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah	23-Jun-21	AD1CD8N3DNQSEPMV	9.025.000,00
9	Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah	28-Jun-21	FD0648VUIV1JLSO	6.750.000,00
10	Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	22-Jun-21	6A3F761QU83N7D92	5.700.000,00
14	Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung	2-Nov-21	9D6028N3DO95UBRR	2.000.000,00
11	Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah	9-Nov-21	4914D0N9V93RPL8S	1.080.000,00
12	Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah	9-Nov-21	740758N3DO9BEKVF	7.904.274,00
13	Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah	9-Nov-21	9D1FF6U8E34IKKKF	1.268.183,00
15	Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah	9-Nov-21	A143CON9V93RPI9E	7.050.000,00
Total				69.868.429,00

Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu berasal dari hasil temuan audit operasional yang dilakukan inspektorat wilayah III dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengembalian atas kelebihan pembayaran Uang Saku RDK tahun anggaran 2020 pada Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung sebesar Rp3.350.000,00;

2. Pengembalian atas kelebihan pembayaran Pengadaan Seragam tahun anggaran 2020 pada Bawaslu Kep. Bangka Belitung sebesar Rp5.094.472,00;
3. Pengembalian atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas Bawaslu Kabupaten Bangka Barat tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.314.000,00;
4. Pengembalian atas kelebihan pembayaran Honor Pokja Bawaslu Kabupaten Bangka Barat tahun anggaran 2020 sebesar Rp14.962.500,00
5. Pengembalian atas kelebihan pembayaran Honor Pokja Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan tahun anggaran 2020 sebesar Rp3.990.000,00
6. Pengembalian atas kelebihan pembayaran Uang Saku RDK Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah tahun anggaran 2020 sebesar Rp350.000,00;
7. Pengembalian atas kelebihan pembayaran Sewa Meubelair dan peralatan kantor Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah tahun anggaran 2020 sebesar Rp30.000,00;
8. Pengembalian atas kelebihan pembayaran Honor Pokja Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah tahun anggaran 2020 sebesar Rp9.025.000,00;
9. Pengembalian atas kelebihan pembayaran Jasa Iklan Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah tahun anggaran 2020 sebesar Rp6.750.000,00
10. Pengembalian atas kelebihan pembayaran Honor Pokja Bawaslu Kabupaten Belitung Timur tahun anggaran 2020 sebesar Rp5.700.000,00;
11. Pengembalian atas pembayaran kelebihan Uang Saku Kegiatan Bimtek Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.080.000,00.

12. Pengembalian atas kelebihan pembayaran Pengadaan Sticker Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp7.904.274,00;
13. Pengembalian atas selisih pengadaan seminar kitt (MUG) Kegiatan Sosialisasi Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.268.183,00;
14. Pengembalian atas selisih pengadaan X-Banner Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp7.050.00,00;

Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu yang berasal dari hasil reuiu Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang dilakukan oleh BPKP perwakilan Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan rincian sebagai berikut

1. Pengembalian atas kelebihan pembayaran Honor Narasumber Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2019 sebesar Rp2.000.000,00

Sedangkan DKEL sebesar Rp18.479.017.105,00 merupakan belanja netto yang berasal dari anggaran rupiah murni, terdiri dari :

Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) per 31 Desember 2021

No	Belanja	Realisasi Belanja Netto (Rp)
1	Belanja Pegawai	5.963.165.541,00
2	Belanja Barang	12.510.401.564,00
3	Belanja Modal	5.450.000,00
Jumlah		18.479.017.105,00

Kenaikan/(Penurunan) Ekuitas **E.5 Kenaikan/(Penurunan) Ekuitas**

Kenaikan/Penurunan Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar minus Rp6.981.830.895,00 dan Rp1.999.082.251,00.

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

(Rp6.981.830.
895,00)

*Perbandingan Kenaikan/Penurunan Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31
Desember 2020*

Kenaikan/Penurunan Ekuitas	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
Surplus/Defisit LO	(22.391.690.981,00)	(43.786.027.310,00)
Koreksi atas Reklasifikasi	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Non revaluasi	0,00	0,00
Koreksi Lain-Lain	(2.998.411.825,00)	0,00
Transaksi Antar Entitas	18.408.271.911,00	45.785.109.561,00
Kenaikan/(Penurunan) Ekuitas	(6.981.830.895,00)	1.999.082.251,00

Ekuitas Akhir

E.6 Ekuitas Akhir

*Rp2.369.603.1
46,00*

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.369.603.146,00 dan Rp9.351.434.041,00. Nilai Ekuitas Akhir merupakan akumulasi nilai ekuitas awal sebesar Rp9.351.434.041,00 ditambah penurunan sebesar minus Rp6.981.830.842,00 sehingga nilai ekuitas akhir adalah sebesar Rp2.369.603.146,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 Perubahan SOTK

Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua Bawaslu Provinsi. Sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi. Sesuai Perbawaslu nomor 1 tahun 2021 Sekretariat Bawaslu Provinsi Bangka Belitung termasuk kedalam klasifikasi kelas B. Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas B terdiri atas :

- a. Bagian Administrasi;
- b. Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat;
- c. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum; dan
- d. Kelompok jabatan fungsional.

Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas B terdiri atas :

- a. Subbagian Administrasi;
- b. Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat; dan
- c. Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; dan Hukum.

Sehubungan dengan SOTK tersebut Bawaslu Kabupaten/Kota sudah diajukan menjadi Unit Kerja Mandiri sebagai persiapan Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi Satuan Kerja. Pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 2 Kabupaten yang menjadi Unit kerja Mandiri yaitu Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah dan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur. Terdapat Perubahan Pejabat struktural dan pengisian Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut:

Semula

Provinsi/Kabupaten/Kota	Jabatan	Nama
Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung	Kepala Sekretariat	: Roy M Siagian
	Kepala Bagian Administrasi	: Siti Jamilah
	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	: -
	Kepala Sub Bagian SDM dan Umum	: Rogrius Sinulingga
	Kepala Bagian Pengawasan	: Hilton Tampubolon
	Kepala Sub Bagian Pengawasan	: Midiarsih
	Kepala Sub Bagian Humas dan Hubal	: Dedy Mulia
	Kepala Bagian P3SPH	: Yaumil Ikrom
	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Hukum	: -
	Kepala Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Proses	: Iwan Kurniawan
Bawaslu Kota Pangkalpinang	Koordinator Sekretariat	: Marini
Bawaslu Kabupaten Bangka	Koordinator Sekretariat	: Wahyu
Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah	Kepala Sekretariat	: Win Iskandar
Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan	Koordinator Sekretariat	: Yudi Arista
Bawaslu Kabupaten Bangka Barat	Koordinator Sekretariat	: Erlan
Bawaslu Kabupaten Belitung	Koordinator Sekretariat	: Zainal Muttaqin
Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Kepala Sekretariat	: Arief Firmansyah

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Menjadi

Provinsi/Kabupaten/Kota	Jabatan	Nama
Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung	Kepala Sekretariat	: Roy M Siagian
	Kepala Bagian Administrasi	: Siti Jamilah
	Kepala Bagian Pengawasan	: -
	Kepala Bagian P3SPH	: Yaumil Ikrom
	Analisis Pengadaan Barang dan Jasa	: Rogrius Sinulingga
	Pranata Komputer	: Midiarsih
	Analisis Hukum	: Rahardzian Pradipta
	Analisis Hukum	: Aryan Riadi
Bawaslu Kota Pangkalpinang	Koordinator Sekretariat	: Marini
Bawaslu Kabupaten Bangka	Koordinator Sekretariat	: Wahyu
Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah	Kepala Sekretariat	: Win Iskandar
Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan	Koordinator Sekretariat	: Yudi Arista
Bawaslu Kabupaten Bangka Barat	Koordinator Sekretariat	: Erlan
Bawaslu Kabupaten Belitung	Koordinator Sekretariat	: Zainal Muttaqin
Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Kepala Sekretariat	

F.2 Penjelasan Mengenai Rekening Aktif yang Di Gunakan

Rekening yang masih aktif dan digunakan sampai dengan 31 Desember 2021 adalah 8 Rekening dengan jenis rekening *Virtual Account* pada Bank Mandiri untuk pengelolaan dana APBN dengan rincian sebagai berikut :

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Rincian Rekening Aktif Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

No	Nomor Rekening	Nama Rekening	Cabang
1	8100126862851000	BPG 015 BAWASLU PROV BABEL	Mandiri KK Pangkalpinang City Hall
2	8100126862851001	BPP 015 PANWASLU BANGKA TENGAH	Mandiri KCP Koba
3	8100126862851002	BPP 015 PANWASLU BANGKA SEL	Mandiri KCP Toboali
4	8100126862851003	BPP 015 PANWASLU PANGKALPINANG	Mandiri KCP Mentok
5	8100126862851004	BPP 015 PANWASLU BANGKA	Mandiri KCP Sungailiat
6	8100126862851005	BPP 015 PANWASLU BELITUNG TIM	Mandiri KK Pangkalpinang City Hall
7	8100126862851006	BPP 015 PANWASLU BANGKA BARAT	Mandiri KC Tanjung Pandan
8	8100126862851007	BPP 015 PANWASLU BELITUNG	Mandiri Cabang 16905

Atas Perubahan Rekening Pengelolaan APBN menjadi rekening *Virtual Account* maka dilakukan penutupan rekening Giro yang dimiliki Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Rekening	Nama Rekening	Cabang	Keterangan	Tanggal Penutupan
1	169-00-6666555-2	BPG 015 Bawaslu Prov. Babel	Mandiri KK Pangkalpinang City Hall	Rekening Giro APBN	25-Feb-21
2	169-00-0087049-0	BPP 015 Panwaslu Bangka Tengah	Mandiri KCP Koba	Rekening Giro APBN	26-Feb-21
3	169-00-1520171-5	BPP 015 Panwaslu Bangka Selatan	Mandiri KCP Toboali	Rekening Giro APBN	26-Feb-21
4	169-00-0087158-9	BPP 015 Panwaslu Bangka Barat	Mandiri KCP Mentok	Rekening Giro APBN	26-Feb-21
5	169-00-0087139-9	BPP 015 Panwaslu Bangka	Mandiri KCP Sungailiat	Rekening Giro APBN	26-Feb-21
6	169-00-0086832-0	BPP 015 Panwaslu Pangkalpinang	Mandiri KK Pangkalpinang City Hall	Rekening Giro APBN	26-Feb-21
7	169-00-0087196-9	BPP 015 Panwaslu Belitung	Mandiri KC Tanjung Pandan	Rekening Giro APBN	26-Feb-21
8	169-00-0087195-1	BPP 015 Panwaslu Belitung Timur	Mandiri Cabang 16905	Rekening Giro APBN	26-Feb-21

Sehubungan dengan telah berakhirnya PILKADA maka dilakukan penutupan atas Penggunaan Rekening Pemerintah Lainnya yang digunakan sebagai Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Rekening	Nama Rekening	Cabang	Keterangan	Tanggal Penutupan
1	209001000249300	RPL 015 PDHL BAWASLU	BRI KCP Mentok	RPL Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung	11-May-21
2	1553011152	RPL 015 PDHL BAWASLU	SUMSEL BABEL KC Toboali	RPL Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung	4-May-21
3	219401000182308	RPL 015 PDHL BAWASLU	KCP Koba	RPL Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung	6-May-21
4	209301000275303	RPL 015 PDHL BAWASLU	KCP Manggar	RPL Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung	11-May-21

F.3 Pergantian Pejabat Perbendaharaan

Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pejabat Perbendaharaan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 1 Januari Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Provinsi/Kab/ Kota	Jabatan Perbendaharaan	Nama	No SK	Tanggal SK
Bawaslu Provinsi	KPA	Roy M Siagian	001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020	02-Jan-20
	PPK	Dedy Mulia	135/BAWASLU.BB/SET/KU.01.00/XII/2020	30-Dec-20
	PPSPM	Siti Jamilah	008a/BAWASLU-BB/HK.01.01/I/2020	02-Jan-20
	BPP	Fitri Widiastuti	077/BAWASLU.BB/SET/HK.01.01/XII/2020	30-Dec-20
Bawaslu Pangkalpinang	PPK	Marini	076/BAWASLU.BB/SET/HK.01.01/XII/2020	30-Dec-20
	BPP	Levi	075/BAWASLU.BB/SET/HK.01.01/XII/2020	30-Dec-20

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Provinsi/Kab/Kota	Jabatan Perbendaharaan	Nama	No SK	Tanggal SK
Bawaslu Kab. Bangka	PPK	Wahyu Perdana	076/BAWASLU.BB/SET/HK.01.01/XII/2020	30-Dec-20
	BPP	Jawari	075/BAWASLU.BB/SET/HK.01.01/XII/2020	30-Dec-20
Bawaslu Kab. Bangka Tengah	PPK	Win Iskandar	076/BAWASLU.BB/SET/HK.01.01/XII/2020	30-Dec-20
	BPP	Edwin Tirta	075/BAWASLU.BB/SET/HK.01.01/XII/2020	30-Dec-20
Bawaslu Kab. Bangka Selatan	PPK	Yudi Arista	076/BAWASLU.BB/SET/HK.01.01/XII/2020	30-Dec-20
	BPP	Kristanto	075/BAWASLU.BB/SET/HK.01.01/XII/2020	30-Dec-20
Bawaslu Kab. Belitung	PPK	Zainal Muttaqin	076/BAWASLU.BB/SET/HK.01.01/XII/2020	30-Dec-20
	BPP	Hendra Saputra	075/BAWASLU.BB/SET/HK.01.01/XII/2020	30-Dec-20
Bawaslu Kab. Belitung Timur	PPK	Arief Firmansyah	076/BAWASLU.BB/SET/HK.01.01/XII/2020	30-Dec-20
	BPP	David Nur	075/BAWASLU.BB/SET/HK.01.01/XII/2020	30-Dec-20

Per 31 Desember 2021 terdapat perubahan Pejabat Perbendaharaan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan rincian sebagai berikut :

Provinsi/Kab/Kota	Jabatan Perbendaharaan	Nama	No SK	Tanggal SK
Bawaslu Provinsi	KPA	Roy M Siagian	001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020	2-Jan-20
	PPK			
	PPSPM	Siti Jamilah	008a/BAWASLU-BB/HK.01.01/I/2020	2-Jan-20
	BPP	Fitri Widiastuti	077/BAWASLU.BB/SET/HK.01.01/XII/2020	30-Dec-20
Bawaslu Pangkalpinang	PPK	Marini	076/BAWASLU.BB/SET/HK.01.01/XII/2020	30-Dec-20
	BPP	Levi	075/BAWASLU.BB/SET/HK.01.01/XII/2020	30-Dec-20

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Provinsi/Kab/Kota	Jabatan Perbendaharaan	Nama	No SK	Tanggal SK
Bawaslu Kab. Bangka	PPK	Wahyu Perdana	076/BAWASLU.BB/SET/HK.01.01/XII/2020	30-Dec-20
	BPP	Jawari	075/BAWASLU.BB/SET/HK.01.01/XII/2020	30-Dec-20
Bawaslu Kab. Bangka Tengah	PPK	Win Iskandar	076/BAWASLU.BB/SET/HK.01.01/XII/2020	30-Dec-20
	BPP	Edwin Tirta	075/BAWASLU.BB/SET/HK.01.01/XII/2020	30-Dec-20
Bawaslu Kab. Bangka Selatan	PPK	Yudi Arista	076/BAWASLU.BB/SET/HK.01.01/XII/2020	30-Dec-20
	BPP	Kristanto	075/BAWASLU.BB/SET/HK.01.01/XII/2020	30-Dec-20
Bawaslu Kab. Belitung	PPK	Zainal Muttaqin	076/BAWASLU.BB/SET/HK.01.01/XII/2020	30-Dec-20
	BPP	Hendra Saputra	075/BAWASLU.BB/SET/HK.01.01/XII/2020	30-Dec-20
Bawaslu Kab. Belitung Timur	PPK	Zainal Muttaqin	141.A/KU.01.00/BB/09/2021	03-Sept-21
	BPP	David Nur	075/BAWASLU.BB/SET/HK.01.01/XII/2020	30-Dec-20

F.4 Dampak Pandemi Covid-19

F.4.1 Refocusing Anggaran

Sehubungan dengan terjadinya Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya pemotongan anggaran di Tahun anggaran 2021, Berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 Hal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 Tahap IV dan Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 0282/PR.03.01/SJ/07/2021 perihal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 Tahap IV maka dilakukan pemotongan Pagu Anggaran sebesar Rp1.120.867.000,00 atas rincian nilai tersebut dapat dilihat pada Lampiran V.

F.4.2 Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Nasional

Sehubungan dengan terjadinya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana 3 kabupaten yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung ditetapkan PPKM level 4 sedangkan kota Pangkalpinang ditetapkan PPKM level 3 maka di putuskan dilakukan penundaan pelaksanaan Kegiatan SKPP Tingkat Menengah yang termasuk kedalam Program Prioritas Nasional yang semula akan dilaksanakan pada bulan September tetapi karna di kota Pangkalpinang diberlakukan PPKM level 3 maka kegiatan SKPP Tingkat menengah di undur menjadi tanggal 17 s.d. 21 Oktober 2021.

F.5 Tindak Lanjut Hasil Audit

1. Tindak lanjut atas Laporan Hasil Reviu Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah ditindaklanjuti seluruhnya (tuntas) berdasarkan surat dari BPKP perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor: S-2924/PW29/2/2021 Hal : Tindak Lanjut Hasil Reviu Tanggal 8 November 2021, rincian atas surat tersebut terlampir pada Lampiran VI.
2. Tindak lanjut atas Laporan Hasil Reviu Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 pada Bawaslu Kabupaten Bangka Barat telah ditindaklanjuti seluruhnya (tuntas) berdasarkan surat dari BPKP perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor: S-3119/PW29/2/2021 Hal : Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Reviu Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 pada Bawaslu Kab. Bangka Barat tanggal 1 Desember 2021, rincian atas surat tersebut terlampir pada Lampiran VII.
3. Tindak lanjut atas Laporan Hasil Reviu Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 pada Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah telah ditindaklanjuti seluruhnya (tuntas) berdasarkan surat

dari BPKP perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor: S-3329/PW29/2/2021 Hal : Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Reviu Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 pada Bawaslu Kab. Bangka Tengah tanggal 24 Desember 2021, rincian atas surat tersebut terlampir pada Lampiran VIII.

4. Sehubungan dengan Audit Operasional pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 1 Januari 2020 s.d. 30 April 2021 yang dilakukan Inspektorat wilayah III pada tanggal 7 s.d 18 Juni 2021 dengan hasil audit yang tercantum pada Laporan Hasil Audit Operasional pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 nomor : 262.A/PW.01/IP/11/2021 tanggal 15 November 2021, tindak lanjut atas hasil audit operasional tersebut terlampir pada lampiran IX

F.6 Laporan Hasil Penilaian PPIK

Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor: 0062/KU.02/SJ/01/2022 tanggal 6 Januari 2022 hal: Pelaksanaan Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2021 Unaudited Tingkat UAKPA, serta Penilaian PIPK Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan Penilaian PIPK dengan akun signifikan yang telah ditentukan oleh Bawaslu RI sebagai berikut :

1. Kas Di Bendahara Pengeluaran;
2. Peralatan dan Mesin; dan
3. Tanah.

Penilaian PIPK Tahun 2021 pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperoleh hasil Efektif sebagaimana surat Hasil Penilaian PIPK pada Lampiran X pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah efektif.